



KEMENKES RI

# LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jumlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya. LKj tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LKj dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LKj ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LKj ini oleh setiap jajaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 2 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**

NIP. 19740612 200501 2 016

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan Esselon IV sejumlah 3 Jabatan yakni 3 Kepala Sub Bagian.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana

Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2023 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 90,37% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASA EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Dasar Hukum.....	3
D. Casecading Kinerja .....	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, .....	10
F. Isu Strategis Perangkat daerah .....	18
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	19
H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya .....	25
I. Sistematika Penyajian .....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	29
A. Visi RPJMD .....	29
B. Misi RPJMD .....	29
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	30
D. Perjanjian Kinerja .....	36
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	40
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	40
1. Sasaran RPJMD .....	40
2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan) .....	42
3. Eselon III ( Sekretaris) A.....	54
4. Eselon III (Kepala Bidang) B .....	57
a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat .....	57
b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	76
c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.....	108
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.....	135

5. Eselon IV	
a. Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1 .....	166
b. Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2 .....	171
c. Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3 ..	175
B. Akuntabilitas Keuangan .....	181
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023 .....	181
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	184
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.....	186
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	189
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	190
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. IKU	
2. SK Tim Penyusunan LKJ SKPD Tahun 2022	
3. Pernyataan Hasil Reviu	
4. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
5. Cascading ( Pohon Kinerja )	
6. Matrik Tindak Lanjut LHE	
7. Monev Renstra	
8. Matrik Keselarasan 2022	
9. SOP Pengumpulan Data	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	14
Tabel 1.2	15
Tabel 1.3	16
Tabel 1.4	17
Tabel 2.1	25
Tabel 2.2	30
Tabel 2.3	32
Tabel 3.1	38
Tabel 3.2	42
Tabel 3.3	45
Tabel 3.4	54
Tabel 3.5	55
Tabel 3.6	55
Tabel 3.7	57
Tabel 3.8	59
Tabel 3.9	63
Tabel 3.10	66
Tabel 3.11	70
Tabel 3.12	73
Tabel 3.13	77
Tabel 3.14	81
Tabel 3.15	83
Tabel 3.16	86
Tabel 3.17	103
Tabel 3.18	121
Tabel 3.19	149
Tabel 3.20	166
Tabel 3.21	168
Tabel 3.22	169

Tabel 3.23	170
Tabel 3.24	177
Tabel 3.25	178
Tabel 3.26	179

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	43
Grafik 3.2	44
Grafik 3.3	58
Grafik 3.4	61
Grafik 3.5	62
Grafik 3.6	64
Grafik 3.7	65
Grafik 3.8	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut “**Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual, SInergi)**” **melalui pelaksanaan program/kegiatan pada** Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan selain tetap fokus pada pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas maupun posyandu juga kedepan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang ada di Pelaihari. Peningkatan kualitas ini guna merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama maupun konsekwensi dari adanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan, maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

Arah dari pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Pembangunan gizi juga diarahkan untuk mewujudkan keasadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh serta peningkatan pengetahuan akan gizi.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas; puskesmas pembantu dan posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Penetapan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## D. Cascading Kinerja

**CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**T U J U A N**

1. Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**S A S A R A N**

1		2	
Meningkatnya status kesehatan masyarakat		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
1.1.	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	1.1.	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
1.2.	AKB per 1000 kelahiran hidup		
1.3.	Prevelensi Stunting		
1.4.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		
1.5.	IKS ( Indeks Keluarga Sehat)		

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
1.1.	Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	1.1.	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan
1.2.	Persentase FKTP Yang Terakreditasi (minimal Madya)	1.2.	Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar
1.3.	Persentase apotik, Toko Obat, dan Optical yang memiliki izin	1.3.	Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

SUBKOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL		SUBKOR PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		SUBKOR PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN		SUBKOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT		SUBKOR PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		SUBKOR KESLING, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.1.	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.1.	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	1.1.	Persentase Usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
1.2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.2.	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota			1.2.	Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	1.2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.3.	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1.3.	Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	1.3.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.3.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
1.4.	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.4.	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			1.4.	Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	1.4.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		1.5.	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin			1.5.	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	1.5.	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	1.5.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
						1.6.	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1.6.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

										1.7.	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		KEPALA BIDANG Sumber Daya Kesehatan	
1.1.	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	1.1.	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

SUBKOR SURVEILANS DAN IMUNISASI		SUBKOR Pencegahan P2M		SUBKOR Pencegahan P2TM DAN KESWA		SUBKOR KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN		SUBKOR Fasilitas Pelayanan Kesehatan		SUBKOR Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.1.	Persentase orang terduga Tuberkulosis yang dilayani sesuai Standar	1.1.	Persentase usia produktif yang dilayani kesehatannya sesuai Standar	1.1.	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.1.	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.2.	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.2.	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.2.	Persentase Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai Standar	1.2.	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	1.2.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
1.3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.3.	Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.3.	Persentase Penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai Standar	1.3.	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1.3.	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.3.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
1.4.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.4.	Jumlah Orang menderita HIV/AIDS yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart	1.4.	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai Standar	1.4.	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1.4.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Di tingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
		1.5.	Jumlah Penderta Malaria yang dilayani Kurang dari 1 per 1.000 penduduk sesuai standart	1.5.	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.5.	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.5.	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		

				1.6. Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.6. Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.6. Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Kepala Dinas  
Kesehatan  
Kabupaten Tanah  
Laut

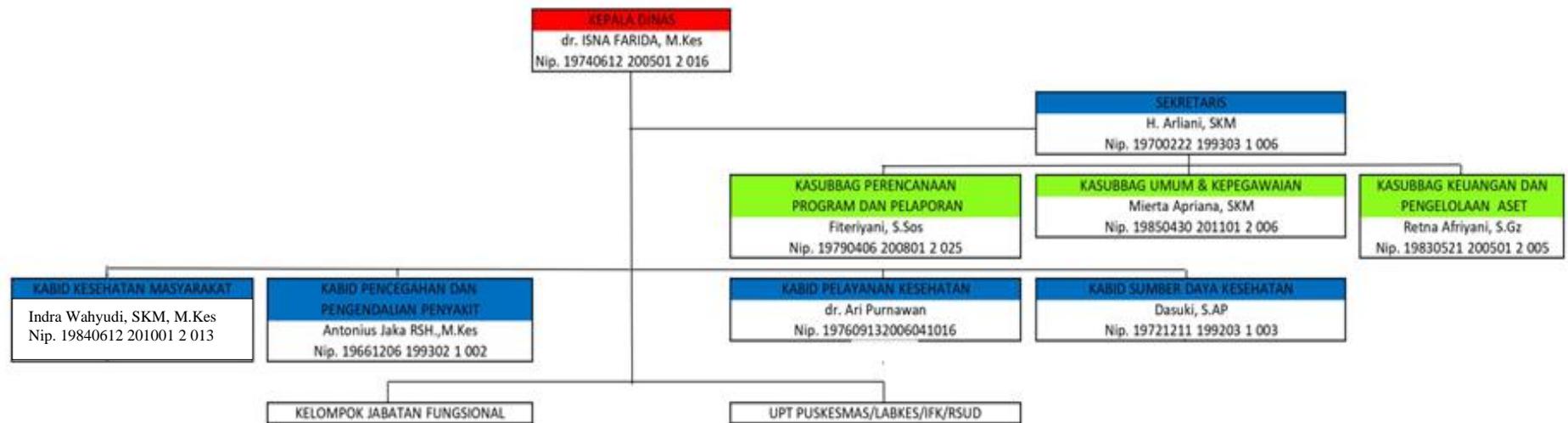


dr. Hj. Isna Fahda, M.Kes  
Pembina Tingkat.I / IVb

NIP.19740612 200501 2 016

### E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



**Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:**

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Tugas dan fungsi:**

**Kepala Dinas**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas
  - e. pembinaan UPT Dinas dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat**

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

- (2) Mempunyai fungsi :
- a. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas dinas
  - b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan dinas kesehatan
  - c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas kesehatan
  - d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
  - e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
  - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang.
  - g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
  - h. Pengeordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan dinas kesehatan
  - i. Pengeordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Sekretariat membawahi dari:**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

### **Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset**

- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja bidang kesehatan Masyarakat
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
  - d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

### **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Pelayanan Kesehatan**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

- (2) Menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (pkrt) serta sumber daya manusia kesehatan
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
  - d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
  - e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **UPT Dinas**

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- 4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Tata Kerja**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- 5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka, pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- 6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- 7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

### **Kepegawaian**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

### **Jabatan**

- 1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **F. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan kesehatan di tahun 2023 yaitu:

- Penurunan angka stunting;
- Penurunan kematian ibu dan bayi;
- Perbaikan pengelolaan sistem JKN;
- Penguatan pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan.

## G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut beserta Upt memiliki pegawai sebanyak 993 orang yang terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 8 orang, Kepala Sub Bagian (Pejabat Pangawas) sebanyak 9 orang dan, staf pelaksana sebanyak 975 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan dan UPT

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			7			7
4	Kepala Sub Bagian				9		9
6	Pelaksana					81	81
8	Struktural					13	13
10	Jabatan Fungsional Tertentu					881	881
	<b>JUMLAH</b>	0	1	8	9	975	993

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		2	2					4

4	Kepala Sub Bagian		1	2					3
5	Staf		10	17	24	4			55
	<b>JUMLAH</b>		14	22	24	4			64

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 14 orang memiliki pendidikan S2, 22 orang memiliki pendidikan S1, 24 orang memiliki pendidikan D3 dan 4 orang memiliki pendidikan SLTA dengan jumlah 64 orang di Dinas Kesehatan.

Terkait dengan LKj, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

- a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut

Tabel 1.3

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Golongan							Jumlah
		IV	III	II	I	X	IX	VII	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat	1	13	6					20
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	4	5						9
4	Bidang P2P	3	8	1					12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	8	2					11
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	8	1					11
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	37	179	39	2	8		7	272

8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	31	30		3	1	3	69
9	UPT Labkes	1	7	1			1	1	11
10	UPT IFK	1	11						12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	4	35	6		1		1	47
12	UPT Puskesmas Angsau	3	27	4					34
13	UPT Puskesmas S. Riam		18	4					22
14	UPT Puskesmas Panyipatan		15	5		1		2	23
15	UPT Puskesmas Batakan		11	4					15
16	UPT Puskesmas Takisung	1	23	1					25
17	UPT Puskesmas Jorong	1	19	6			1		27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	4	16	7		1			28
19	UPT Puskesmas Kintap	2	22	4					28
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		13	4				2	19
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		29	6		1		1	37
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	20	3				1	26
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	2	21	4				1	28
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	13	5					19
25	UPT Puskesmas Kurau		16	6		1		1	24
26	UPT Puskesmas Padang Luas		11	9		2	1	1	24
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	25	3					29
28	UPT Puskesmas T. Habulu		10	7		1		1	19
29	UPT Puskesmas B. Makmur		16	8		1		2	27
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung	1	16	2			3		22
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		13	2		2	2	3	22
32	UPT Puskesmas Panggung	1	14	5					20
		75	673	185	2	22	9	27	993

- b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel .1.4  
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT  
menurut tingkat pendidikan tahun 2023

No	Unit Kerja	Golongan							Jumlah
		S-2	S-1	DIII	DI	DII	SMA	SMP	

1.	Kepala Dinas	1								1
2.	Sekretariat	2	7	7			4			20
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan	1	5	3						9
4.	Bidang P2P	5	3	4						12
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	2	5	4						11
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	3	2	6						11
7.	UPT. RSUD H. Boedjasin	36	100	127			5	2	2	272
8.	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	4	25	40						69
9.	UPT Labkes		4	5			2			11
10.	UPT IFK	1	5	6						12
11.	UPT Puskesmas Pelaihari	2	13	30			2			47
12.	UPT Puskesmas Angsau	1	13	20						34
13.	UPT Puskesmas S. Riam		5	17						22
14.	UPT Puskesmas Panyipatan	1	6	15	1					23
15.	UPT Puskesmas Batakan		9	5			1			15
16.	UPT Puskesmas Takisung	1	12	12						25
17.	UPT Puskesmas Jorong	1	4	22						27
18.	UPT Puskesmas Asam-Asam	2	8	18						28
19.	UPT Puskesmas Kintap	1	8	19						28
20.	UPT Puskesmas Sei Cuka		4	14	1					19
21.	UPT Puskesmas Tajau Pecah	2	9	25	1					37
22.	UPT Puskesmas T. Ulang	2	7	17						26
23.	UPT Puskesmas Bati-Bati		8	18		1	1			28
24.	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	3	14	1					19
25.	UPT Puskesmas Kurau	1	5	16	2					24
26.	UPT Puskesmas Padang Luas	2	4	17	1					24
27.	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	8	17	3					29
28.	UPT Puskesmas T. Habulu	2	3	13	1					19
29.	UPT Puskesmas B. Makmur	1	6	20						27
30.	UPT Puskesmas Bentok Kampung		10	12						22
31.	UPT Puskesmas Durian Bungkok	2	5	15						22
32.	UPT Puskesmas Panggung	1	4	15						20
		79	310	573	11	1	15	2	2	993

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam

Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2023, melaksanakan 5 program, 20 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
<b>DINKES</b>			<b>249,961,585,112</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		<b>124,572,387,092</b>
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,938,387
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121,382,528,563
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,999,150
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674,505,973
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,994,000
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,190,656,019
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,765,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>111,796,599,237</b>
	I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,871,515,582
	II	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	8,742,440

	III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,952,232
	IV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,491,388,983
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>12,946,148,033</b>
	I	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,935,350,062
	II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,010,797,971
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>361,893,945</b>
	I	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116,913,300
	II	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84,109,434
	III	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,100,000
	IV	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150,771,211
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>284,556,805</b>
	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,222,565
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,999,240
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	147,335,000

**H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun, dapat dipertahankan dan tetap melakukan perbaikan atau penyempurnaan guna mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik apabila diperlukan.	Melakukan perbaikan dan Penyempurnaan dokumen perencanaan untuk penajaman target indicator Kinerja Utama pada Rencana Kerja terhadap pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD	Dokumen Renja Perbaikan	1 Minggu (Bulan Juni 2023)	Perbaikan/ Penajaman target dalam Dokumen Renja
2	Agar dilakukan Monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala kendala dalam pencapaian target dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Akan dilakukan monitoring secara berkala secara berjenjang atas Data capaian kinerja dan renaksi dikumpulkan per triwulan untuk melihat kemajuan dan situasi kegiatan	Evaluasi Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	1 Minggu (Bulan Juni)	Dokumen Kinerja dapat di evaluasi pencapaiannya
3.	1. Agar menginfokan analisis dan Evaluasi realisasi Kinerja dengan realisasi Tahun tahun sebelumnya setidaknya 2 (dua) Tahun terakhir	Akan di lakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan yang memuat realisasi kinerja pada Tahun tahun sebelum nya sebagai pembanding untuk perbaikan Kinerja	Penajaman evaluasi realisasi pada Dokumen SAKIP	1 Minggu (Juni)	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	2. Agar menginfokan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja baik sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Anggaran secara lengkap pada setiap analisis capaian program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kinerja disusun memuat informasi Capaian dan Hambatan serta solusi sebagai bahan evaluasi dan monitoring</li> <li>- Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP) dapat digunakan sebagai penilaian dan perbaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian target tahun berikutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengukuran Kinerja Triwulanan LPPD, Lapkin Laporan SPM</li> </ul>	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
	3. Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan Kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas	Menyusun dan menyajikan Laporan Pengukuran kinerja secara berkala baik bulanan/ triwulan/ maupun semesteran	Penajaman Laporan Capaian Kinerja pertriwulan dan Lapkin Tahunan	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala pada level dibawahnya dibuktikan dengan terjadinya perbaikan dan Peningkatan Kinerja	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan di evaluasi secara berkala	4 kali (pertriwulan)  Sedang berproses	Maret, Juni September dan Desember	Sekretaris

## **I. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II ( Kepala Dinas/Badan)
3. Eselon III ( Sekretaris/Kepala Bagian)
  - 1). Eselon IV ( Kasubbag /Kasubbid) A.1
  - 2). Eselon IV ( Kasubbag/Kasubbid ) A.2
4. Eselon III (Kepala Bidang)

#### B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

### BAB IV PENUTUP

#### A. Simpulan

#### B. Strategi Peningkatan Kinerja

#### Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Cascading (Pohon Kinerja)
5. Capaian Per Triwulan (I - IV)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan 2023

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI  
(BERkarya, INovasi, TERtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

#### B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

### C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai misi Dinas Kesehatan adalah :

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2023

<b>VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)</b>						
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang</b>	<b>Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat</b>	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	10	<b>Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat</b>	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	100%
		AKB per 1000 kelahiran hidup	9,2		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	100%
		Prevalensi stunting	20%		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang	100%

berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya					dilayani sesuai Standar			
					4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%		
					<b>Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat</b>	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	60%	
						2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	
					<b>Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,</b>	1. Persentase desa STBM	100%	
						2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	
						3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	
					<b>Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga</b>	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	
						<b>Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%
							2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%

					3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%
	<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>1. Indeks kepuasan masyarakat</b>	88,31	<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	68%
		<b>2. Indeks Keluarga Sehat</b>	0,8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%
					3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%
					4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	50%
					5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%
					6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%
					<b>Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.
					2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%
					3. Persentase obat dan BMHP yang	100%

					sesuai Formularium Nasional	
					1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%
				<b>Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran</b>	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%
					2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%
					3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%
					4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%
					5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%
					6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	74

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan,sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2019-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan pada lampiran.

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan Indikator sebagai berikut:
  - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
  - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
  - c. Prevalensi Stunting
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator sebagai berikut :
  - a. Indeks Keluarga Sehat
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3	Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam

menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2023 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan

dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Renstra maupun Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV terdapat pada lampiran. Perjanjian kinerja tahun 2023 telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2023 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

#### E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	10	158	6.3
		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	9.2	10.2	90.2
		Prevalensi Gizi stunting (%)	20	4.55	439.56
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85.9	88.31	102.81
		IKS ( Indeks Keluarga Sehat)	0.202	0.8	396.04
		<b>INDIKATOR KINERJA</b>			
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	100%	77.7%	77.7%
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	100%	86.9%	86.9%

		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	100%	89.4%	89.4%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%	84.6%	84.6%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	60%	50.8%	84.7%
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	100%	100%	100%
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	57.14%	71.42%
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	61.38%	87.68%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100.00%	100.00%
		2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100.00%	100.00%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	87.1%	87.1%
		4. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	98,5	95,5
		5. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	84.44	84.44
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama (dan Paripurna)	68%	73%	107%
		2. Persentase Pelayanan kegawat darurat oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	50%	0.015%	0.03%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%	100%	178.6%
		6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	94.51%	94.5%

7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	80%	80%	100.0%
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	55.42%	55.4%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	100%	90%	90.0%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100.0%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100.0%
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100.0%
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100.0%
		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100.0%
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100.0%
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	74	81.5	110.14

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

##### 1. Sasaran RPJMD

Dalam mencapai sasaran Strategis RPJMD Dinas Kesehatan merupakan Instansi yang memangku Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang dapat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

No	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2023		
			2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,45	69,59	69,86	69,80	74,46	106,67 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>								

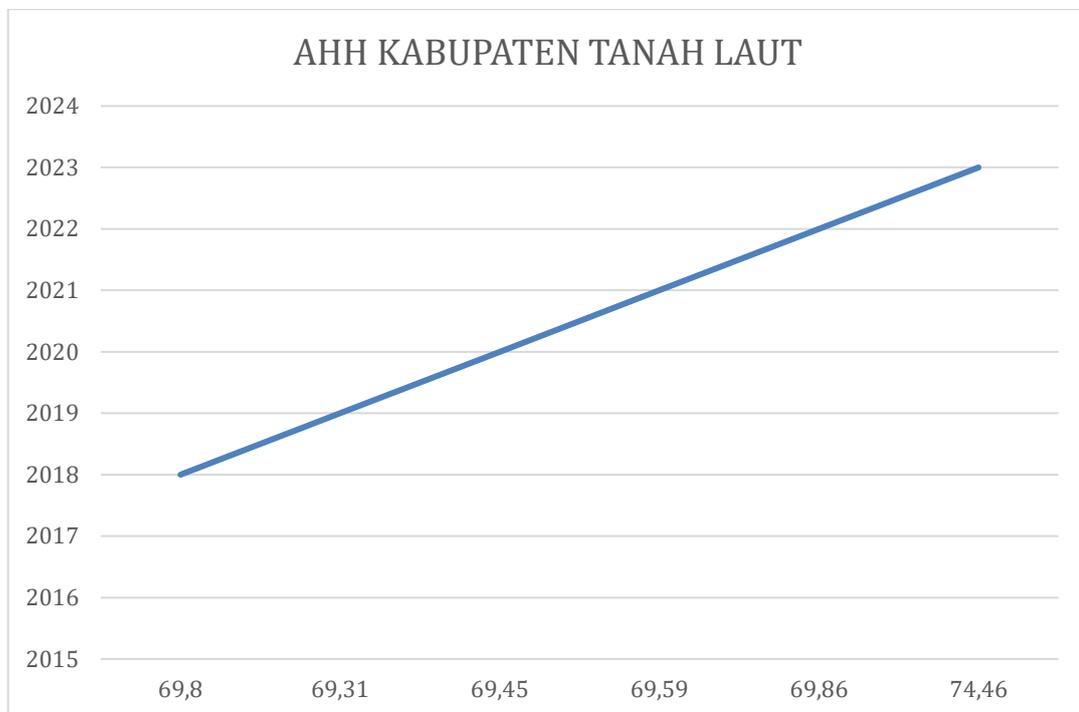
Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata peluang untuk hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indikator tersebut. Umur Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam menghitung umur harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup dilakukan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Realisasi indikator Angka Harapan Hidup tahun 2023 adalah 74,46 tahun, realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,80 tahun dengan tingkat capaian 106,67 % mengalami peningkatan 4,6 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018-2023 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.2  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018-2023



Pada tahun 2022, angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut sebesar 69,86 sementara pada tahun 2023 angka tersebut meningkat menjadi 74,46. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 diharapkan mencapai umur 74,46 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya.

## 2. Eselon II

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama  
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023					
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	50,5	10	158	6.3	367,227,925	325,152,950	42,058,775
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	12,3	9,2	10,2	90.2	413,342,850	374,006,250	39,336,600
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	5.4	20	4,55	439.6	2,895,502,096	2,249,152,116	646,349,980
4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,24	85,9	88,31	102.8			
5	IKS ( Indeks Keluarga Sehat)	0,202	0,202	0,8	396.0			

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi gizi stunting.

### 1) Angka Kematian Ibu

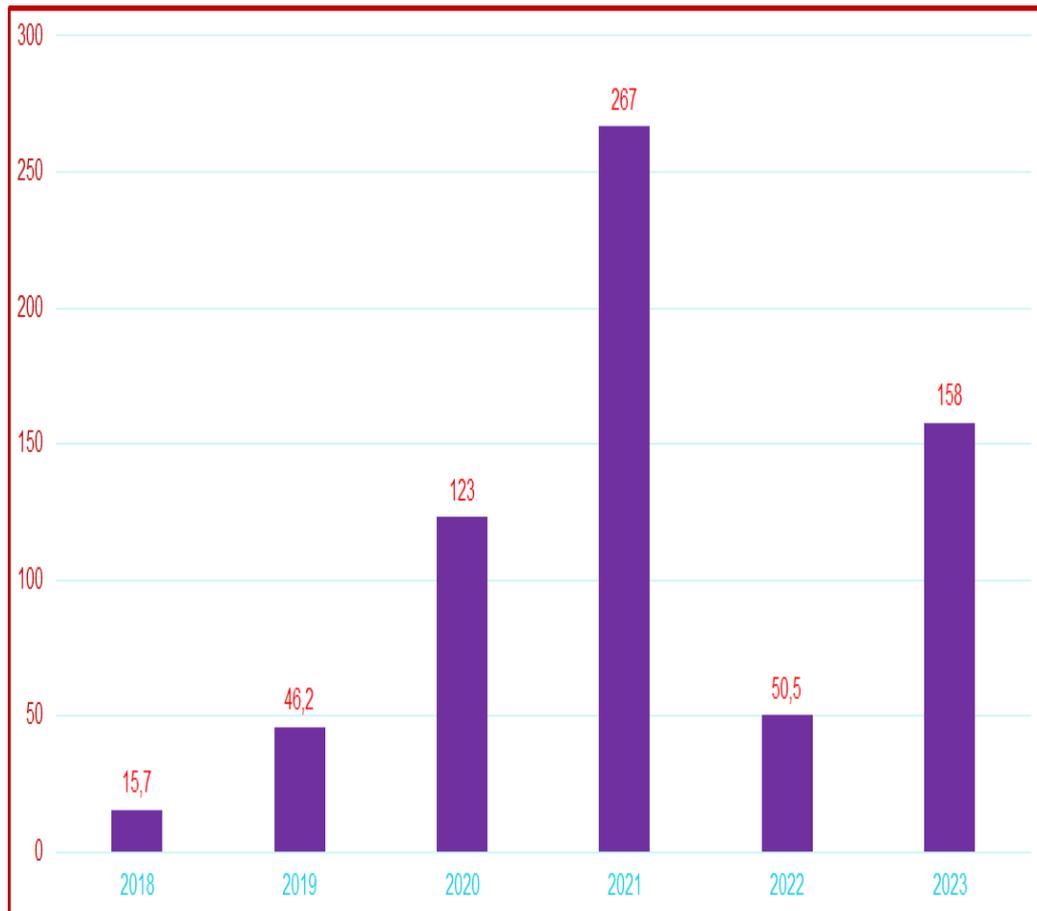
Angka kematian ibu pada tahun 2023 sebesar 158 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan, yang mana pada tahun 2023 ini ada 9 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5679 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 158 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka tersebut diatas target Renstra Kabupaten Tanah Laut yaitu 10 per 100.000 KH, akan tetapi dari dibawah target nasional (RPJMN) yaitu sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di gambarkan dalam gambar berikut.

Grafik. 3.3

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023

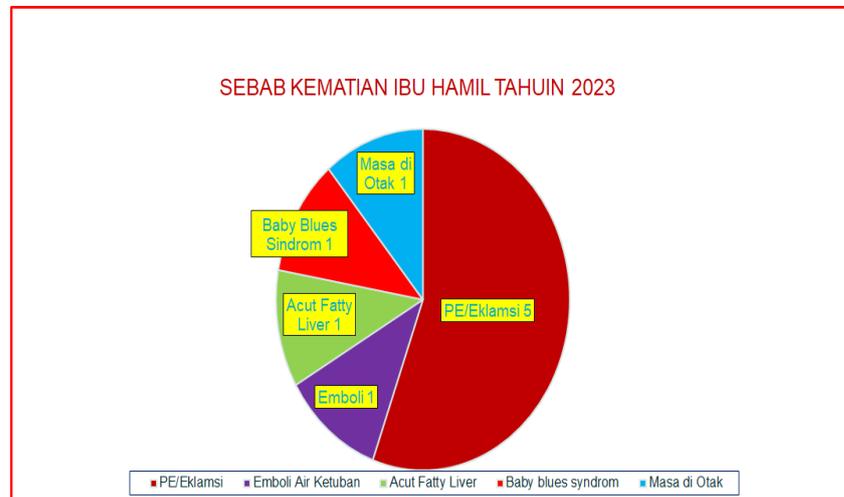


Gambar diatas menunjukkan capaian AKI dari tahun 2018 dan 2023 meningkat, dan pada tahun 2022 kematian ibu mengalami penurunan kasus dan ditahun 2023 mengalami peningkatan kasus.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 10,2 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini lebih tinggi dari target Renstra Kabupaten Tanah Laut, namun lebih rendah dari target RPJMN yaitu 17,6 per 1000 Kelahiran Hidup. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan

riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Grafik. 3.4  
Penyebab Kematian Ibu tahun 2023



Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Kondisi saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rata-rata diatas 90 % di masing-masing wilayah kerja puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil. Yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat. Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan SDM Kesehatan : Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, Pelatihan USG untuk Dokter Umum di 22 Puskesmas.

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Audit Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Berisiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB. Pelayanan USG di Puskesmas dalam rangka Skrening Ibu Hamil K1 dan K5.
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi.
- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
- Pemantapan sistem rujukan terutama sistem rujukan ibu hamil dan bersalin
- Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan .
- Pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa.

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan	Kebijakan Pemeriksaan bumil gratis bagi yang mempunyai KTP Tanah Laut
			Implementasi ANC Terpadu
			Tata laksana dan Rujukan
			Audit Maternal Perinatal
			Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas secara berkala
			Pengadaan USG untuk semua Puskesmas.

2	Petugas	Kompetensi petugas yang masih beragam	Peningkatan kapasitas petugas
		Pemantauan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan oleh petugas belum optimal	Jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu
			Penguatan peran bidan desa
			Pelatihan USG bagi dokter Umum di semua Puskesmas
			Monev pelaksanaan PISPK
3	Faktor Ibu	Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang	Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
			Konsultasi dokter ahli melalui kunjungan dokter spesialis kandungan ke Puskesmas secara berkala
			Peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Perbaikan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia	Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia
4	Pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal	Peningkatan pelayanan ambulan desa
			Kelas ibu hamil melibatkan keluarga ibu hamil
			Sosialisasi Layak Hamil

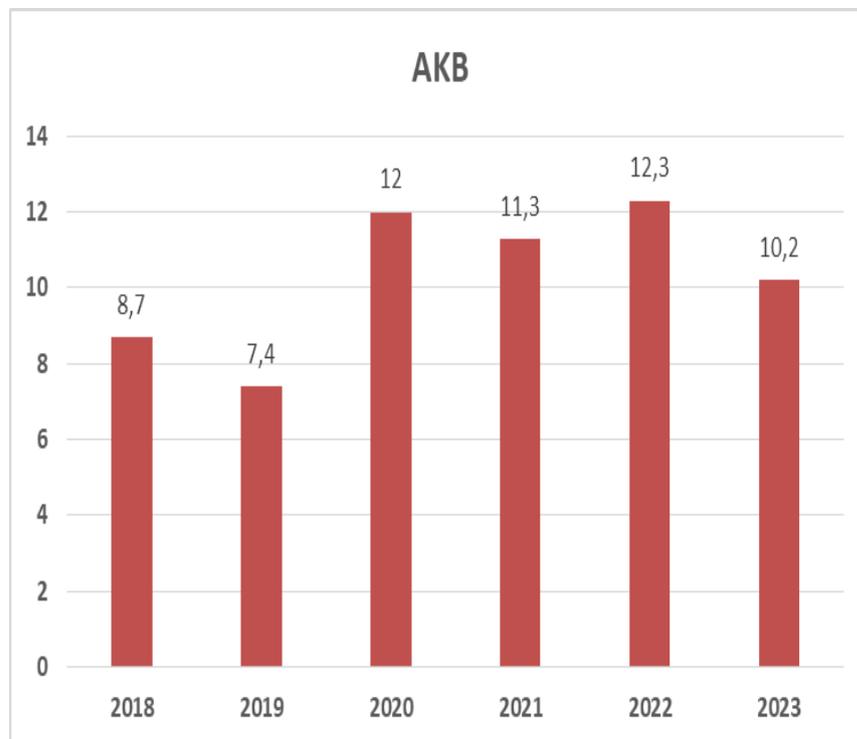
			Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat
--	--	--	---

## 2) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2023 jumlah absolut kematian bayi sebesar 58 kematian bayi dari 5.679 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 sebesar 10,2 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan terjadi penurunan Angka Kematian Bayi dibandingkan tahun 2022 dimana AKB sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup. Target Renstra AKB Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup yang artinya AKB tahun 2023 masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2023 sebesar sebesar 10,2 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 17,6 per 1000 kelahiran hidup. Kecenderungan pencapaian AKB pada tahun 2019-2023 di sajikan dalam gambar berikut :

Grafik : 3.6

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023

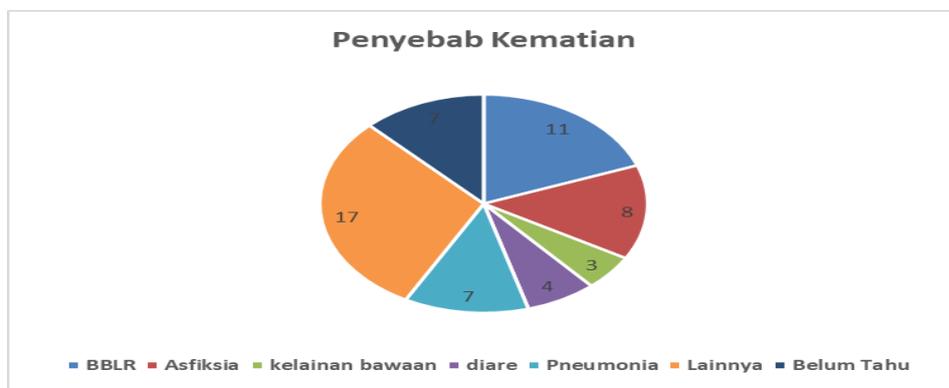


Sebanyak 10% kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi

kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi di Tanah Laut. Penyebab kematian bayi adalah BBLR (Bayi Baru Lahir Rendah) 11 orang, Asfiksia 8 orang, Kelainan bawaan 3 orang, pneumonia 7 orang, diare 4 orang, penyebab lainnya 17 orang ( meningitis, kejang demam dll) dan belum diketahui penyebabnya sebanyak 7 orang

Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada grafik berikut :

Grafik : 3.7  
Penyebab Kematian Bayi



Dari gambar di atas terlihat paling banyak penyebab kematian bayi adalah penyebab lainnya, ini menunjukkan kompleksnya bentuk komplikasi yang mungkin dialami anak selama periode bayi (0-11 bulan), salah satunya adalah kurang optimalnya dalam penanganan gizi sejak dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
- program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
- peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan
- Peningkatan pelaksanaan skrining Layak hamil pada Wanita Usia Subur (WUS)

- e) Keterlibatan dokter Spesialis Anak di Puskesmas dalam rangka Deteksi Dini Risiko Tinggi pada Bayi dan Balita
- f) Pendampingan ibu hamil KEK oleh tenaga kesehatan dan kader serta pemberian PMT lokal
- g) Optimalisasi pencatatan dan pelaporan kasus kematian Bayi dan Balita melalui MPDN yang bisa diakses secara *real time*

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

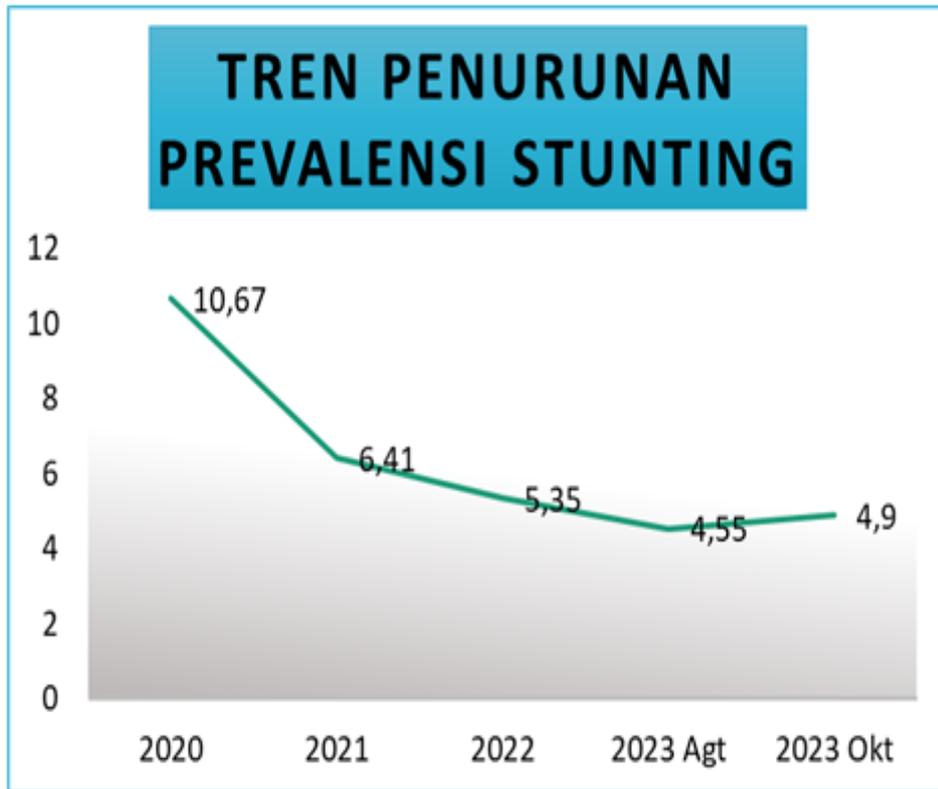
No	FAKTOR/ KENDALA	ANALISA PENYEBAB/ KENDALA	TINDAK LANJUT/ INTERVENSI
1	Penyakit pada bayi	BBLR	Skrining Layak Hamil, Kunjungan rumah, deteksi dini Bumil berisiko tinggi, Optimalisasi asupan Zat Besi selama Kehamilan (min 90 tablet)
			Pemberian makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Protein
			Penyuluhan perorangan tentang peningkatan gizi ibu hamil
		Asfiksia	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatus
		Pneumonia	Peningkatan KIE pada kelas ibu hamil dan Balita terkait Pentingnya imunisasi
		Kelainan bawaan	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia serta optimalisasi pemberian asam folat pada Trimester 1 (K1)

2	Faktor Ibu	Masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan atau anemia serta pemantauan berkala
			Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja
		Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita
			Optimalisasi Pelaksanaan Kelas ibu hamil dan Kelas ibu balita
3	Petugas	Kapasitas petugas dalam skrining bayi beresiko	Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
			Workshop penanganan BBLR dan Pelatihan Petugas dalam Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan Penyakit Jantung Bawaan (PJB)
			Audit Maternal Perinatal bayi
			Pelayanan dokter spesialis Anak dalam deteksi risiko tinggi pada bayi dan balita
			Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Masih ada sarana dan prasarana Puskesmas tidak sesuai standar	Peningkatan sarana prasarana puskesmas (pemenuhan alkes Puskemas)

### 3) Prevalensi Stunting

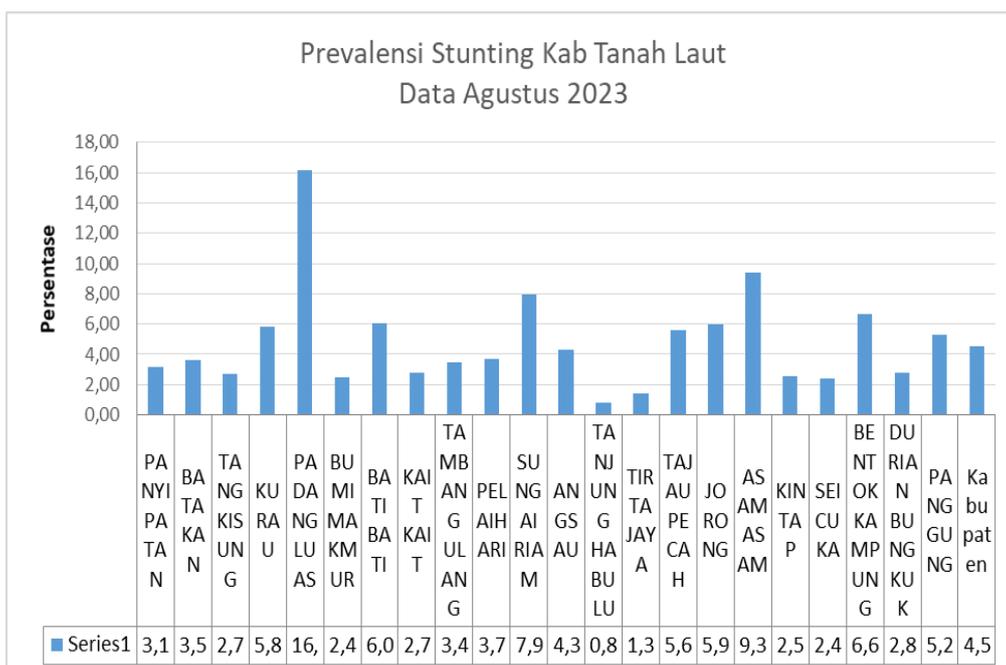
Pada tahun 2023 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 4,9 % dari target <16 % yaitu sebanyak 1298 orang Balita gizi stunting dari 26483 Balita yang terentry di EPPGBM. Prevalensi 2023 lebih rendah daripada prevalensi stunting 2022 yaitu 5,35%. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 20,27 %,

dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting. untuk sebaran prevalensi gizi stunting bisa dilihat pada Grafik berikut:



Grafik : 3.9

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023



Data diatas merupakan hasil penarikan E-PPGBM Bulan Agustus 2023 ditemukan sebanyak 1.244 balita stunting dari 27.362 balita yang diukur tinggi/panjang badannya. Prevalensi stunting Kabupaten Tanah Laut sendiri berada di angka 4.55 % yang mana mencapai target nasional yaitu kurang dari 14 %.

Capaian ini juga sudah melampaui target Kalimantan selatan yaitu dibawah 22%, banyaknya kasus gizi stunting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga. Pencapaian angka prevalensi gizi stunting ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil (didas nilai 100 %).

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna terus menurunkan Prevalensi stunting Balita pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas
- b) Pelatihan Pemantau Pertumbuhan bagi petugas
- c) Pelatihan Bagi TOT PMBA dan MTBS
- d) Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
- e) Surveilans gizi, dan pemberian intervensi
- f) Konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter umum dan dokter Spesialis anak
- g) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK.
- h) Operasi Timbang

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan Prevalensi Stunting sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut :

Tabel : 3.10  
 Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Prevalensi  
 Gizi Stunting dan Rencana Intervensi  
 di Kabupaten Tanah Laut

<b>NO</b>	<b>FAKTOR RESIKO</b>	<b>ANALISA PENYEBAB</b>	<b>RENCANA INTERVENSI</b>
1	Balita	Penyakit kongenital	Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
			Pemberian asam folat saat kehamilan
		Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare	Pelacakan dan pengobatan kasus TB
			Kampanye ASI eksklusif
			Promosi PHBS
			Penyuluhan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit balita (MTBS)
		Asupan gizi	Pemberian PMT balita gizi buruk dan dan balita kurus
			Pelatihan kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (Kader PMBA
2	Petugas	Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas	Workshop permasalahan gizi
			Bimtek petugas gizi
			Monev Fasilitator PMBA
			Audit kasus Gizi Buruk
			Monev pelaksanaan PISPK

### 3. Eselon III

#### a. Sekretaris

#### Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

Sasaran strategis Nomor 8 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.12

Tabel Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2022			2023			2023
<b>Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran</b>	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 %	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	89%	89%	100%	100%	100%	100,0 %	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 %	100%

4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 %	100%
5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 %	100%
6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	73	81,30	111,36	74	81,5	110,14		74
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>101%</b>			<b>101%</b>		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran capaian kinerjanya rata-rata tahun 2023 **101 % dengan kategori sangat baik.**

1. Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran dengan baik dan sesuai aturan dimana dari target 5 jenis pelayanan administrasi yang diberikan seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan nilai realisasi 101%, adapun sumber daya manusia yang ada dalam mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang pengelola kepegawaian.
2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar dimana dari jumlah target sarana dan prasarana diperoleh persentase realisasi sebesar 100%. Hal ini dapat terlihat adanya peningkatan realisasi dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 89%. adapun sumber daya manusia yang ada dalam mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang pengelola kepegawaian, 4 orang PTT tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga jaga malam.

3. Persentase Pelayanan kepegawaian sesuai standar dimana dari jumlah pegawai sebanyak 993 orang seluruhnya mendapatkan pelayanan kepegawaian sesuai standar dengan nilai realisasi 100%. Hal ini telah mencapai target renstra di tahun 2023. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengelola kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang Pengemudi.
4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dari jumlah laporan sebanyak 1 laporan dan telah diselesaikan sesuai standar sehingga realisasi 100% baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Hal ini berarti realisasi di tahun 2023 sudah mencapai target yang diinginkan untuk target jangka menengah tahun 2023 yaitu 100%. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang analis keuangan, 1 orang bendahara, 1 orang pengelola keuangan dan 2 orang pengadministrasi keuangan dan 3 orang PTT tenaga administrasi.
5. Persentase pencatatan aset sesuai standar telah mencapai target yaitu 100% dimana dari target 1 laporan aset dalam 1 tahun telah dilaksanakan. Hal ini telah mencapai target renstra tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun untuk sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang pengadministrasi keuangan, 2 orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan 1 orang PTT tenaga administrasi.
6. Nilai laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj) tahun 2023 yaitu 81,5 dari target 74 ini berarti nilai LKj sudah mencapai angka 110,14%. Dan merupakan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai SAKIP Dinas Kesehatan sudah mencapai Nilai A yang berarti Baik. Untuk sumber daya manusia yang mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Sekretaris, 1 orang kasubbag perencanaan dan Pelaporan, Analis Program anggaran dan pelaporan 1 (satu), Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 (satu), Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 1 (satu) orang, Pengelola pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan anggaran pos dan informatika 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang,. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SAKIP Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- Adanya beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target.
- Kurang terintegrasinya data program
- Ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 18 PNS yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 orang Kasubbag Keuangan, 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dan 15 orang staf. Sekretaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 101% dengan realisasi anggaran Rp.218.153.016.384 dari pagu anggaran Rp.249.961.585.112 dengan rata rata 87% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Sekretariat rata - rata sebesar 13 % dari 5 Program 20 Kegiatan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Sekretaris

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan sasaran Indikator yang masih belum tercapai yaitu:

1. Peningkatan SDM baik dibagian Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Aset serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.
2. Melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja di bagian ke sekretariat secara berkala.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Sumber Daya Manusia yang ada yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut dengan dibantu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, serta Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.

## **b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

### **Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4**

Sasaran strategis Nomor 1, 2, 3 dan 4 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.16

Tabel Sasaran Strategis 1,2,3 dan 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke								
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran
		2022			2023					
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	95%	81,50%	85,80%	100%	77,7	77,70%	344,808,975	302,750,200	42,058,775
	2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	95%	91,20%	96%	100%	86,9	86,90%	22,418,950	22,402,750	0
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	98%	95,60%	97,50%	100%	89,4	89,40%	47,970,000	47,970,000	0
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	95%	84,70%	89,10%	100%	84,58	84,58%	365,372,850	326,036,250	39,336,600
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	50%	53%	106%	60%	50,8	84,60%	44,999,240	44,897,760	101,48
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	168,105,280	137,526,080	30,576,200
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	84,60%	100%	120%	100%	100%	100%	336,310,000	146,790,000	189,520,000
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	83%	105%	80%	43%	53,75%	80,570,000	65,940,000	14,630,000
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	83%	119%	70%	60%	85,71%	91,770,000	67,270,000	24,500,000
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,300,000	47,935,000	16,365,000
	2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja		100%		100%	100%	100%	167,395,000	121,215,000	46,180,000
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>90%</b>			<b>87,50%</b>			

Tabel diatas menjelaskan **rata-rata pencapaian kegiatan 87,5% dengan kategori realisasi kinerja tinggi**. Adapun aspek yang harus dicapai yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 4 indikator diantaranya;
  - a. Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya 100% dan realisasi sebesar 5310 hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya 77,7 %. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 85,8%. dari target 90% .
  - b. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya 100% dan realisasi sebesar 5670 hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya 86,9%. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 91,2% dari target 90% .
  - c. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya sebesar 100% dan realisasi sebesar 89,4% jika dibandingkan dengan sasaran proyeksi 2023. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2022.
  - d. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar. Pada tahun 2023 target sebesar 100% dan realisasi capaian indikator ini sebesar 84,58 %. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan targetnya 95% dan realisasi sebesar 89,1% hal ini masih berada dibawah target dan terjadi penurunan tren.

Dari keempat indikator sasaran di atas rata-rata pencapaian kegiatan 84,65 % dengan kategori belum berhasil. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelayanan ibu dan anak yang belum terlaksana secara optimal terutama dari segi pencatatan dan pelaporan. Adapun hal perbaikan yang akan dilakukan yaitu optimalisasi dan validasi pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar, membuat inovasi bersama organisasi profesi dan lintas sektor terkait dan melakukan pendataan sasaran. Selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga dilakukan seperti mengadakan pelatihan bagi tenaga medis dan bidan, penambahan tenaga kesehatan di desa yang masih tidak ada khususnya Bidan Desa serta pengadaan

alat kesehatan yang menunjang dalam upaya kesehatan keluarga- Gizi Puskesmas melalui pendanaan APBD dan DAK NF tahun 2023

2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 2 indikator yang harus dicapai diantaranya;
  - a. Persentase Rumah tangga yang berPHBS. Pada tahun 2023 targetnya 60% dan realisasi sebesar 50,8 % dengan nilai capaian sebesar 84,6 %. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 53,0% dari target 60% dimana capaian kinerjanya sebesar 88,3 %. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu indikator masih banyak anggota keluarga yang merokok dalam rumah sehingga capaian indikator tersebut yang ber PHBS hanya sebesar 54,0 %, sehingga kedepannya perlu menggunakan sumber daya seperti SDM, sarana dan prasana, inovasi maupun pendanaan yang digunakan perlu ditingkatkan untuk ketercapaian kegiatan.
  - b. Persentase desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk tahun 2023 dengan target 35 desa dan realiasi 35 desa atau sebesar 100% dari target sebesar 100%, sedangkan di tahun 2022 realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Adapun peningkatan capaian sangat besar ini dipengaruhi karena dampak dari kondisi Covid-19 sudah mulai menurun dan aktifitas mulai normal, sehingga kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang merupakan kegiatan mengumpulkan masyarakat bisa kembali dilakukan.
3. Meningkatnya Kesehatan lingkungan Untuk mencapai sasaran tersebut ada 3 indikator yang harus dicapai diantaranya;
  - a. Persentase Desa STBM. Pada tahun 2023 targetnya 100% dan realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 100%. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 targetnya 84.6 % dan realisasi 100% dengan nilai capaian sebesar 120%.
  - b. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 targetnya 80% dan realisasi sebesar 43% dengan nilai capaian sebesar

53.75%. Ini berarti pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 targetnya 80% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian 105%.

- c. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 targetnya 70% dan realisasi sebesar 60% dengan nilai capaian sebesar 85.71%. Ini berarti pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 targetnya 70% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian sebesar 119%.
4. Meningkatnya kesehatan Kerja dan Olah Raga. Untuk mencapai sasaran tersebut yaitu indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. Dalam hal ini baik di tahun 2023 maupun 2022 tidak ada perubahan dari target 100% dan realisasinya sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 100%. dan untuk ketercapaian terhadap target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100% telah dicapai. Adapun keberhasilan indikator tersebut dikarenakan di seluruh puskesmas telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga, SDM yang mengelola dan sumber pendanaan yang tersedia.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 11 PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, 1 Orang Sub Koordinator Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 Orang Sub Koordinator Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, 1 Orang Sub Koordinator Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 1 Orang Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, 1 Orang Analis Data dan Informasi, 1 Orang Analis Kesehatan Ibu dan Anak, 1 Orang Analis Gizi, 2 Orang Pengelola Program Kesehatan Keluarga dan 1 orang pengelola penyehatan lingkungan.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Subkoordinator dan pengelola program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subkoordinator dan pengelola program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olah raga dan Subkoordinator dan pengelola program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 11 PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan 10 orang staf. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 76,94 % dengan realisasi anggaran Rp Rp 3.835.176.590 dari pagu anggaran Rp. Rp 4.984.488.537.. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat .

Tabel. 3.16

Tabel Penjelasan Efisiensi Anggaran 1,2,3 dan 4

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Efisiensi Anggaran			
			Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran	Keterangan mencapai/tidak mencapai
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	344.808.975	302.750.200	42.058.775	Kegiatan terlaksana 100 % tapi harga real lebih rendah dari pagu
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	22.418.950	22.402.750	0	Capaian Fisik tidak 100% karena masih adanya Persalinan dengan Non Nakes. untuk Capaian Keuangan karena ada RTK yg lebih rendah dari pagu
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	47.970.000	47.970.000	0	Alasan Belum Tercapainya Realisasi Fisik: -Tingginya angka sasaran Proyeksi Pusdatin - Kematian Neonatal sebanyak 44 BBL sehingga tidak dapat mencapai KN 3
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	365.372.850	326.036.250	39.336.600	Kegiatan terlaksana 100 % tapi harga real lebih rendah dari pagu

2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	44.999.240	44.897.760	101.480	Keuangan dan Fisik sudah hampir 100 %
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	168.105.280	137.526.080	30.576.200	Perjalanan dinas Germas di bulan Januari tidak bisa dilaksanakan karena anggaran baru bisa dilaksanakan bulan Februari
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	336.310.000	146.790.000	189.520.000	Penganggaran untuk verifikasi desa ODF, Deklarasi desa ODF tidak dapat dilaksanakan karena desa/kelurahan tidak siap untuk dilakukan verifikasi dan Deklarasi ODF
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80.570.000	65.940.000	14.630.000	Kegiatan dilakukan akan tetapi penyerapan anggaran berdasarkan jumlah real sarana TTU yang dilakukan Inspeksi sanitasi. Jumlah dapat berubah sesuai dengan keadaan misalnya sarana TTU sedang dalam tahap perbaikan atau renovasi
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	91.770.000	67.270.000	24.500.000	Kegiatan dilakukan akan tetapi penyerapan anggaran berdasarkan jumlah real sarana TPM yang dilakukan

						Inspeksi sanitasi. Jumlah berubah sesuai dengan TPM yang buka/tutup di wilayah kerja puskesmas
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	64.300.000	47.935.000	16.365.000	Terjadinya pemekaran wilayah kerja puskesmas yang berimbas kepada POS UKK yang dibina
		2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	167.395.000	121.215.000	46.180.000	Terjadinya pemekaran wilayah kerja puskesmas yang berimbas kepada jumlah sasaran anak sekolah dan jumlah pegawai yang dilakukan tes kebugaran

○ **Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator yang belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut:

- a. Kendala: Dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 dari jumlah 22 Puskesmas yang melaksanakan survey PHBS targetnya 60% dan realisasi sebesar 50,8 % dengan nilai capaian sebesar 84,6 %. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu indikator masih banyak anggota keluarga yang merokok dalam rumah sehingga capaian indikator tersebut yang ber PHBS hanya sebesar 54,0 %,
- b. Saran perbaikan : dilakukan inovasi Survei PHBS (SIP OK) dengan cara elektronik atau diuji coba menggunakan google form untuk melakukan survei PHBS dan juga untuk kegiatan ini akan menjadi salah satu yang di prioritaskan pada anggaran tahun 2024.

c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan kegiatan survei PHBS dengan menggunakan inovasi SIP OK dan dicoba menggunakan google form untuk mengisi survei PHBS yang akan dilakukan di Tahun 2024.

d. Hal-hal yang sudah dilakukan : Melakukan kegiatan informasi dan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menggunakan berbagai media seperti : media elektronik dan media sosial agar masyarakat lebih mengerti pentingnya Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

1. Seksi Promosi Kesehatan yang tidak mencapai target

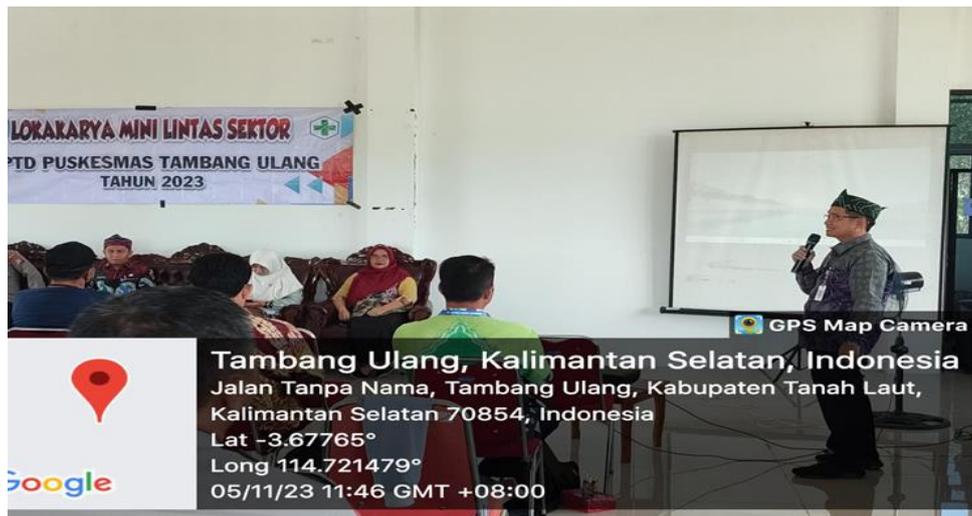
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Survey PHBS	60 %	50,8 %	84,6 %	Indikator masih banyak anggota keluarga yang merokok dalam rumah sehingga capaian indikator tersebut yang ber PHBS hanya sebesar 50,8 %

2. Seksi Promosi Kesehatan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Desa yang melaksanakan Germas	35 desa	35 desa	100 %	

### Foto-Foto Kegiatan 2023 :





○ **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga**

Indikator yang belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut:

1. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 targetnya 70% dan realisasi sebesar 60% dengan nilai capaian sebesar 85.71%.
  - a. Kendala: Tidak tersedia anggaran di Puskesmas yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara optimal
  - b. Saran perbaikan : Mengajukan anggaran untuk kegiatan pengawasan TPM ditahun mendatang.
  - c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada puskesmas terkait penyelenggaraan penyehatan TPM di wilayah puskesmas.
  - d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan kegiatan terkait penyehatan TPM di anggaran tahun 2023.
2. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 targetnya 80% dan realisasi sebesar 43% dengan nilai capaian sebesar 53.75%.
  - a. Kendala:
    - Keterbatasan anggaran di Puskesmas untuk kegiatan inspeksi TTU
    - PHBS di TTU yang belum menjadi budaya
    - Bangunan fisik di TTU yang belum memenuhi syarat
  - b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan
  - c. Rencana aksi/tindak lanjut: Mengusulkan anggaran di Puskesmas untuk mengcover inspeksi TTU, Meningkatkan promosi kesehatan PHBS TTU, meningkatkan

kerjasama lintas sektor terutama dengan Dinas Pendidikan mengenai bangunan fisik sekolah

d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan kegiatan terkait penyehatan TTU di anggaran tahun 2023.

- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang tidak mencapai target

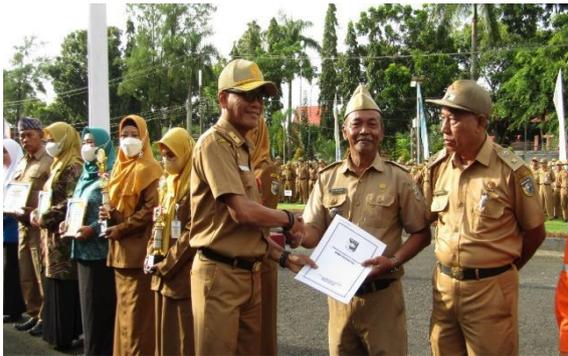
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	80 %	43 %	53,75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran di Puskesmas untuk kegiatan inspeksi TTU</li> <li>- PHBS di TTU yang belum menjadi budaya</li> <li>- Bangunan fisik di TTU yang belum memenuhi syarat</li> </ul>
2	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	70 %	60 %	85,71 %	Tidak tersedia anggaran di Puskesmas yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara optimal

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Persentase desa STBM	100 %	100 %	100 %	

2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja	100 %	100 %	100 %	

**Foto - Foto Kegiatan 2023 :**





o **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

Indikator yang belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut:

- b. Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya 100% dan realisasi sebesar 5310 hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya 77,7 %.
- c. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya 100% dan realisasi sebesar 5670 hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya 86,9%.
- d. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2023 targetnya sebesar 100% dan realisasi sebesar 89,4% jika dibandingkan dengan sasaran proyeksi 2023.
- e. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar. Pada tahun 2023 target sebesar 100% dan realisasi capaian indikator ini sebesar 84,58 %.

Saran Perbaikan : Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringan agar melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada sasaran

Rencana Aksi : Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada sasaran sesuai standar, meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi dan lintas sektor terkait dan mengusulkan anggaran sesuai kegiatan yang dibutuhkan.

Hal-hal yang sudah dilakukan ; melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia.

Kegiatan yang alokasi dana dari DAK Non Fisik yang tidak dapat terserap secara optimal pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (23%) yaitu Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) karena Kabupaten Tanah Laut telah UHC (Universal Health Coverage) atau Jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Tanah Laut.

Kendala : keterbatasan anggaran pada beberapa subkegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dikarenakan sasaran kegiatan berupa orang (SPM), sasaran proyeksi yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan sasaran riil.

Saran Perbaikan : Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringan agar melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada sasaran

Rencana Aksi : Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada sasaran sesuai standar, meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi dan lintas sektor terkait dan mengusulkan anggaran sesuai kegiatan yang dibutuhkan.

Hal-hal yang sudah dilakukan ; melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia.

#### 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Ibu hamil yang dilayani sesuai standar	100 %	77,7 %	77,7 %	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan
2	Ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	100 %	86,92 %	86,92 %	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan
3	bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	100 %	89,44 %	89,44%	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan

4	Balita 0 - 59 bulan yang dilayani sesuai standar	100 %	84,58 %	84,58 %	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan
5	Usia Lanjut umur 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	73,89 %	73,89 %	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan

2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

**Foto-Foto Kegiatan 2023:**



## Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan



## Kunjungan Ibu Nifas



## Penilaian Kinerja Bidan



**Ibu hamil KEK ( Kekurangan Energi Kronik ) dapat PMT**



**Pengukuran tinggi badan pada anak TK**



**Pemberian Vitamin A**



**Kunjungan rumah**



**Pemberian vitamin A**



**Balita Gizi kurang/Underweight dapat PMT**



**Pemberian TTD pada REMATRI (program GEN CETAR)**

**c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

**Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5**

Sasaran strategis Nomor 5 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel.3.18

Tabel Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke								
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran
		2022			2023					
<b>Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	73,80%	73,80%	100%	87,10%	87,10%	850,521,306	511,040,800	339,480,506

2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,215,280	41,216,000	49,999,280
3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	71,10%	71,10%	100%	84,40%	84,40%	258,135,571	183,816,200	74,319,371
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>81,60%</b>			<b>90,50%</b>			

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **90,5 % dengan kategori Tinggi**. Dengan sasaran yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun indikator sasaran yang harus dicapai yaitu:

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Persentasi pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas, mortalitas dari suatu penyakit yang mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, meliputi :

1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar adalah jumlah orang dengan penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi orang dengan penyakit tidak menular berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu yang sama dari target 100% realiasi 87,1% dengan capaian 87,1%, di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 73,8% terjadi kenaikan. Tidak tercapainya target disebabkan kurangnya SDM yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta kurangnya dana kegiatan pada seksi PTM. rumusnya adalah jumlah orang dengan penyakit tidak menular yang dilayani dibagi sasaran orang dengan penyakit tidak menular maka indikator tersebut masih belum mencapai target jangka menengah sebesar 100%..

2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular adalah Jumlah Desa yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam dari target 3 desa realiasi 3 desa dengan capaian 100%, rumusnya adalah persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi < 24 jam maka persentase penanganan KLB di desa 100% dengan perhitungan Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi < 24 jam dibagi Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di kali 100%. Dilihat dari capaian tahun 2022 dan 2023 semuanya desa yang mengalami KLB sudah tertangani (100%)
3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) adalah 84,4 % dari target 135 desa realiasi 114 desa dengan capaian 114 desa, rumusnya adalah 80% anak usia 0-11 bulan di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap maka untuk mendapat angka desa dengan UCI dengan rumus perhitungan jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di bagi jumlah seluruh anak usia 0-11 bulan di kali 100%. Capaian pada tahun 2023 meningkat dari pada tahun 2022 yang pada saat itu masih dalam kondisi Pandemi COVID-19

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 12 PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 3 orang Subkoordinator (P2PM, PTM, Surveilans dan Imunisasi), 8 orang penanggung jawab program. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 66,2% dengan realisasi anggaran Rp. 1.214.707.245 dari pagu anggaran Rp. 1.834.180.072 dengan rata rata 6,5% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rata - rata sebesar 33,8% dari 1 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 12 Sub Kegiatan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Tabel.3.19

Tabel Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis 5

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Efisiensi Anggaran			
			Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran	Keterangan mencapai/tidak mencapai
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	850.521.306	511.040.800	339.480.506	Penganggaran untuk rehabilitasi pengguna napza belum dapat dilaksanakan karena Perjanjian Kerjasama dengan RSJ Sambang Lihum belum selesai
		4. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	91.215.280	41.216.000	49.999.280	Kegiatan terlaksana 51,7% kendalanya pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kejadian kasus dan penanggulangan kasus yang potensial terjadinya KLB
		5. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	258.135.571	183.816.200	74.319.371	Volume pengiriman spesimen yang banyak dari yang dikirim karena untuk antisipasi bila ada lonjakan

#### A. Seksi Surveilans dan Imunisasi

##### 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1.	Persentase Imunisasi Baduta Lengkap (IBL)	100%	63,50%	63,50%	Pengiputan di ASIK delay di Aplikasinya

##### 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Persentase imunisasi TT WUS	80 %	84,53 %	84,53 %	Koordinasi dengan PJ WUS dengan KIA dan koordinator

					imunisasi untuk entry di ASIK nya
--	--	--	--	--	-----------------------------------

3. Seksi Surveilans dan Imunisasi yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
	Persentase Non Polio AFP Rate	3	5.39	5,39	Penyelidikan Epidemiologi Petugas Surveilans sangat aktif

**Foto-Foto Kegiatan :  
Penyelidikan Epidemiologi HRR ke RSUD KH Mansyur**





### Konsultasi ke Kemenkes tentang Aplikasi ASIK



## B. Seksi Pencegahan P2M

### 1. Seksi Pencegahan P2M yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6771	3031	44,76	<i>Double job</i> akibat keterbatasan jumlah SDM sehingga memperlambat terlaksananya program baik pencarian terduga dan penginputan data  Investigasi kontak penderita TB masih rendah
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8263	7497	90,7	Pemetaan populasi kunci masih sulit untuk di laksanakan karena kelompok LSL, Waria, PSK masih menutup diri  Penolakan terhadap pemeriksaan skrining HIV pada kelompok berisiko

2. Seksi Pencegahan P2M yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Penanggulangan penyakit menular dan wabah (KLB)	5	5	100%	surveilant adekuat dan reaksi cepat terhadap kejadian yg potensial terjadinya KLKB

3. Seksi Pencegahan P2M yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Program POPM	74554	70024	93,9	Target sasaran yang mendapatkan obat cacing di data dengan baik pada sekolah, TK/Paud, dan Posyandu

**Foto-Foto Kegiatan :**  
 Penanggulang DBD  
 Pelaksanaan Foging



Penyelidikan Epidemiologi



Penyuluhan HIV di sekolah





### Skrening dan penjangaran HIV



### Koordinasi dalam rangka peningkatan penemuan kasus TBC





C. Seksi Pencegahan P2TM dan Keswa

1. Seksi Pencegahan P2TM dan Keswa yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan	100%	61,8%	61,8%	-sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal melalui ASIK dan SIPTM  -sarana dan prasarana penunjang

	kesehatan sesuai standar				pelaksanaan screening PTM masih terbatas
2	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25%	25%	-sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal melalui ASIK dan SIPTM -Kemampuan SDM petugas kesehatan karena adanya mutasi dan rotasi -Prevalensi target yang tinggi
3	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	94,6%	94,6%	-Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal melalui simkeswa -Screening kesehatan jiwa yang belum optimal

## 2. Seksi Pencegahan P2TM dan Keswa yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

## 3. Seksi Pencegahan P2TM dan Keswa yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
	Persentase penderita diabetes mellitus yang				-Screening DM

	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	149,2%	149,2%	-Penyuluhan tentang DM dan resikonya ke masyarakat
--	--	------	--------	--------	--

**Foto-Foto Kegiatan :**  
**Screening FR PTM di SKPD bulan januari-februari 2023**



## Screening Narkoba di sekolah



## Kegiatan Posbindu



## Pemeriksaan IVA dan Sadanis



## Sosialisasi Perda KTR dan Penyuluhan Napza di Sekolah

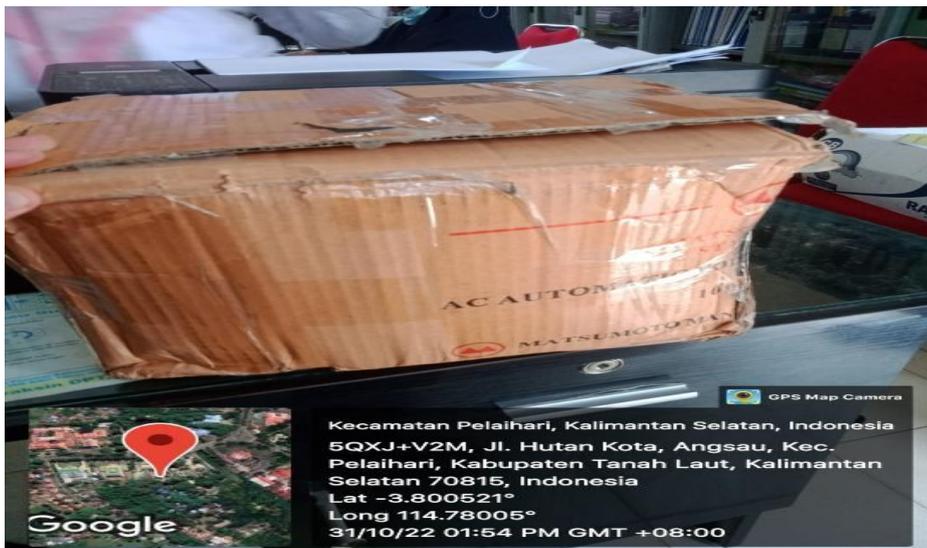




### **Kunjungan Rumah ODGJ**



## Pengantaran ODGJ ke RSJ Sambang Lihum



SKDR | SISTEM SURVEILANS PENYAKIT POTENSIAL KLB/IBAH

Dashboard

Filter KEGIATAN

Unit Pelopor: -Pilih-  
Provinsi: SULAWESI SELATAN  
Kabupaten: -Pilih-  
Tahun: 2022  
Kategori: SGE TANPA-LAUT  
Unit Pelopor: -Pilih-  
Minggu: Minggu 11

No	Proses	Total Unit Pelopor	Mula Program Laporan		Dahulu	%
			Jumlah Log	Jumlah Laporan		
1	BUK TAMBIL	1	52	51	1	98.08
2	PMB ANGGAS	1	52	52	0	100.00
3	PMB SANGKAP	1	52	51	1	98.08
4	PMB BONGKAS	1	52	52	0	100.00
5	PMB BAIT BAIT	1	52	52	0	100.00
6	PMB BERTON KAMPUNG	1	52	49	3	94.23
7	PMB JONGKAS	1	52	51	1	98.08
8	PMB KATIKAT	1	52	52	0	100.00
9	PMB LUSOP	1	52	52	0	100.00
10	PMB LURANG	1	52	48	4	92.31
11	PMB RONGG LUNG	1	52	52	0	100.00
12	PMB RANGKAS	1	52	52	0	100.00
13	PMB PELAIHARI	1	52	52	0	100.00
14	PMB BE CUBA	1	52	52	0	100.00
15	PMB LUNGA BANG	1	52	52	0	100.00
16	PMB TUALANG PEGAH	1	52	48	4	92.31
17	PMB TAMBIL	1	52	50	2	96.15
18	PMB TAMBIL LUNAS	1	52	42	10	80.77
19	PMB TAMBIL HAMBIL	1	52	46	6	88.46
20	PMB TAMBIL JAKA	1	52	51	1	98.08
21	PUSKESMAS DURIAN BUNGGUK	1	52	51	1	98.08
22	RS Bona Ora Makta	1	52	52	0	100.00
23	RS H BOLAHA PELAIHARI	1	52	51	1	98.08
24	RSD H WAREPUN	1	52	49	3	94.23

SKDR | SISTEM SURVEILANS PENYAKIT POTENSIAL KLB/IBAH

Dashboard

Filter KETERPADAN

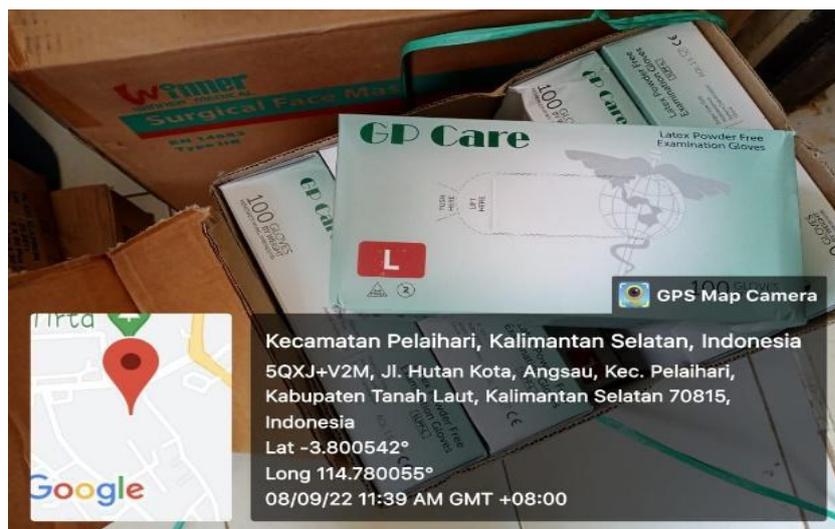
Unit Pelopor: -Pilih-  
Provinsi: SULAWESI SELATAN  
Kabupaten: -Pilih-  
Tahun: 2022  
Kategori: SGE TANPA-LAUT  
Unit Pelopor: -Pilih-  
Minggu: -Pilih-

No	Proses	Total Unit Pelopor	Jumlah Log	Mula Program Laporan		Terdapat	%
				Jumlah Log	Jumlah Laporan		
1	BUK TAMBIL	1	52	48	4	92.31	
2	PMB ANGGAS	1	52	52	0	100.00	
3	PMB SANGKAP	1	52	41	11	77.23	
4	PMB BONGKAS	1	52	52	0	100.00	
5	PMB BAIT BAIT	1	52	51	1	98.08	
6	PMB BERTON KAMPUNG	1	52	47	5	90.38	
7	PMB JONGKAS	1	52	43	9	82.69	
8	PMB KATIKAT	1	52	51	1	98.08	
9	PMB LUSOP	1	52	47	5	90.38	
10	PMB LURANG	1	52	38	14	73.08	
11	PMB RONGG LUNG	1	52	51	1	98.08	
12	PMB RANGKAS	1	52	42	10	80.77	
13	PMB PELAIHARI	1	52	51	1	98.08	
14	PMB BE CUBA	1	52	48	4	92.31	
15	PMB LUNGA BANG	1	52	48	4	92.31	
16	PMB TUALANG PEGAH	1	52	33	19	63.46	
17	PMB TAMBIL	1	52	45	7	86.54	
18	PMB TAMBIL LUNAS	1	52	40	12	76.92	
19	PMB TAMBIL HAMBIL	1	52	47	5	90.38	
20	PMB TAMBIL JAKA	1	52	47	5	90.38	
21	PUSKESMAS DURIAN BUNGGUK	1	52	48	4	92.31	
22	RS Bona Ora Makta	1	52	52	0	100.00	
23	RS H BOLAHA PELAIHARI	1	52	49	3	94.23	
24	RSD H WAREPUN	1	52	43	9	82.69	

### Pengadaan Pembelian Gasket Cold Chain



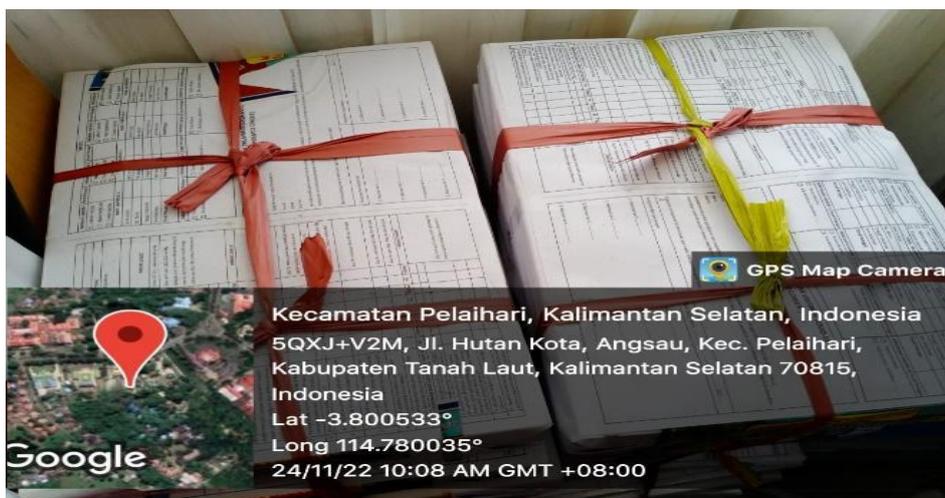
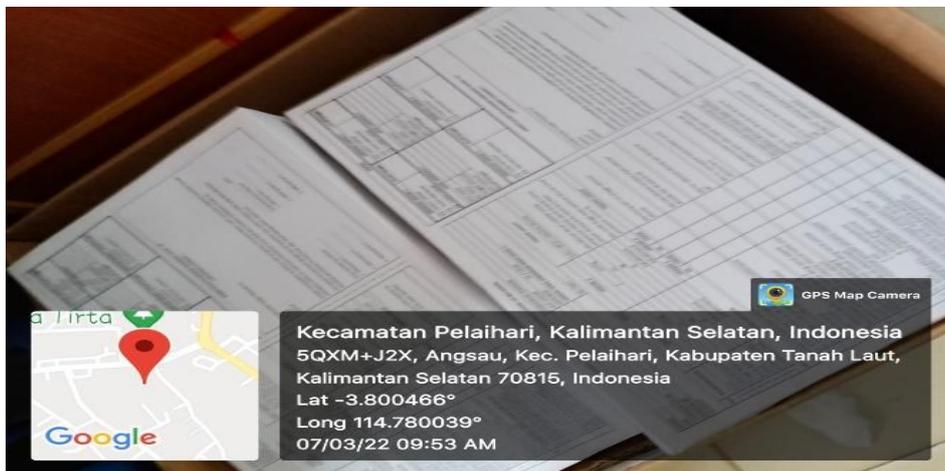
## Pengadaan Pembelian Apron

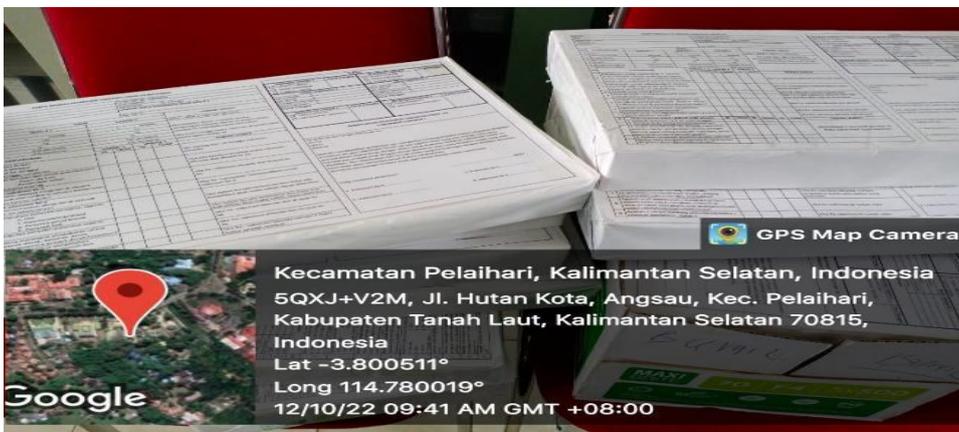


## Pengadaan Pembelian Sarung Tangan dan Masker



## Pengadaan Cetak Formulir Skrining Vaksinasi





### Pengadaan Pembelian Kertas HVS





Pertemuan Di Aula Barakat Lantai II, Hari Rabu Tanggal 21 Des 2022 , Audien Antisipasi Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I ) Dengan Provinsi, UNICEF, Kemenag, Disdik dan PKK



**PERTEMUAN REVIEW PENGELOLA KESEHATAN HAJI  
TANGGAL 18 Mei 2022**



**PERTEMUAN REVIEW SURVEILANS CAMPAK  
TANGGAL 14 JULI 2022**



**PERTEMUAN REVIEW SURVEILANS PENYAKIT POTENSIAL KLB  
TANGGAL 25 JULI 2022**



**PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KEWASPADAAN DINI  
DAN RESPON (SKDR)  
TANGGAL 26 JULI 2022**



## Kegiatan Foging Fokus



## Kegiatan Penanggulangan TBC



## Kegiatan Penanggulangan HIV



## Kegiatan Penanggulangan Kusta Frambusia



## Kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria



#### d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

##### Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

Sasaran strategis Nomor 7 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.17

Tabel Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke								
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran
		2022			2023					
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	75%	70%	93%	80%	80%	100.0%	9,728,420,850	7,647,565,058	2,080,855,792
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	71%	71%	100%	55.42%	55.4%	32,703,517,265	27,030,467,044	5,673,050,221
	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formulirum Nasional	92%	92%	100%	100%	90%	90.0%	4,043,837,467	3,826,204,486	217,632,981
	4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	90%	90%	100%	100%	100.0%	11,640,310,062	8,244,918,400	3,395,391,662
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>88,50%</b>				<b>83,85%</b>		

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **83,85% dengan kategori Tinggi**. Adapun sasaran yang harus dicapai yakni Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 4 indikator sasaran yaitu;

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar. Adalah 100% dari target 80% realiasi 75% dengan capaian 95% rumusannya adalah target fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun tahun 2003 adalah 3 unit, jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 1 unit, sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 2 unit, jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 11 buah dan ambulance yang disediakan 2 unit maka capaian fasilitas pelayanan kesehatan hanya 95 % dikarenakan 1 unit ambulance RSUD Bumi Makmur tidak terealisasi.
2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar adalah 55,42% dari target 100% realiasi 55,42 % dengan capaian 55,42% , rumusnya adalah alat kesehatan yang diadakan dibagi dengan alat kesehatan standar dikali 100% maka didapatkan capaian 55,42% %.
3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional tahun 2023 mengalami penurunan pencapaian dikarenakan pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah dilakukan revisi anggaran dan anggaran Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional adalah 100% dari terget 90 % realisasi 90 % dengan capaian 100 %, rumusnya adalah 40 item obat yang tersedia dibagi dengan 40 item obat yang wajib ada sesuai fornas dikali 100 % maka capaiannya menjadi 100 %. Capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan obat dan BMHP yang direncanakan belum dapat direalisasikan sesuai target
4. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar pada tahun 2023 adalah 100% dari target 100% realiasi 95% dengan capaian 90%, rumusnya adalah 1.743 orang nakes memiliki kompetensi standar dari seluruh nakes 1.838 orang maka mencapai 95% Adanya kesenjangan nakes yang belum memiliki kompetensi standar disebabkan sedang proses pengurusan &/ perpanjangan kompetensi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah

yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 11 PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan,

- ◆ Seksi Fasyankes terdiri dari 1 orang Sub Koordinator dan 1 Orang pengelola Penataan Sarana dan Prasaran
- ◆ Seksi Kefarmasian dan Alkes terdiri dari 1 orang Sub Koordinator, 1 Analis Data dan Informasi, 1 orang Pengelola Kefarmasian, 1 Orang Pengelola obat dan alat-alat Kesehatan
- ◆ Seksi SDM Kesehatan terdiri dari 1 orang Sub Koordinator 1 orang Analis Perencanaan SDM Aparatur, dan 2 orang Pengelola Profesi SDM.
- ◆ Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 88% dengan realisasi anggaran rata rata 86% dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.128.796.563 sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Sumber Daya Kesehatan rata - rata sebesar 14% dari 2 Program 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Tabel. 3.17

Tabel Penjelasan Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis 7

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja				Keterangan mencapai/tidak mencapai
			Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran	
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	9.728.420.850	7.647.565.058	2.080.855.792	1 unit ambulance untuk RS Bumi Makmur tidak terealisasi di karenakan tidak tersedia/tidak sesuai dengan spek
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	32.703.517.265	27.030.467.044	5.673.050.221	anggaran belanja pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas masih belum mencukupi
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	4.043.837.467	3.826.204.486	217.632.981	keterbatasan kemampuan penyedia untuk menyediakan obat dan bhmp yang akan diadakan , keterbatas waktu pengadaan

						karena anggaran perubahan
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	11.640.310.062	8.244.918.400	3.395.391.662	anggaran untuk membayar honor ptt baru beserta iuran jaminan kesehatan,kecelakaan dan kematian dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga di puskesmas tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan pemerintah yang tidak membolehkan pengangkatan Non ASN baru

#### A. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

##### 1. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1.	Jumlah Ambulance yang disediakan	3 unit	2 unit	67%	tidak tersedianya unit ambulance sesuai spesifikasi.

##### 2. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1.	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	3 unit	3 unit	100%	
2.	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	1 unit	100%	
3.	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan	2 unit	2 unit	100%	

kesehatan yang disediakan				
---------------------------	--	--	--	--

**Foto-Foto Kegiatan :**

A. Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun

1. Pagar Samping Puskesmas Tambang Ulang



2. Pembangunan pagar depan Puskesmas Bumi Makmur



### 3. Pembangunan pagar samping Puskesmas Bumi Makmur



## B. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya

### 1. Pembangunan Labkesda



## C. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan

### 1. Genset Labkesda



## 2. IPAL Labkesda



### D. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan

#### 1. Pemasangan paving jalan keluar dan masu Puskesmas Panggung



#### 2. Pemasangan paving block Pustu Kandangan Lama



3. Pemasangan paving block Puskesmas Tajau Pecah



4. Pemasangan paving block Pustu Martadah Baru



5. Pemabangunan Pustu Sungai Rasau



6. Pembangunan Pustu Lok Serapang



7. Rehabilitasi Poskesdes Kayu Abang



8. Rehabilitasi Poskesdes Pandan Sari



9. Rehabilitasi Poskesdes Sungai Baru



10. Rehabilitasi gedung PSC



11. Rehabilitasi Gudang Aset Dinkes



## 12. Pengadaan Ambulance Puskesmas Bati-Bati



## 13. Pengadaan Ambulance Puskesmas Kait-Kait



## 14. Pengadaan AC Puskesmas



## B. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

### 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran			Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar			100	55,42%	55,42%	Anggaran tahun 2023 lebih banyak untuk pemenuhan alat kesehatan untuk RS yang ada dikecamatan Bumi Makmur.
2	Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional			100	90%	90%	Anggaran obat dan BMHP pada Anggaran perubahan sehingga penyedia banyak yang tidak mampu mengadakan obat dan BMHP yang dibutuhkan, waktu pengadaan yang terbatas, ketersediaan

							obat yang kosong
--	--	--	--	--	--	--	------------------

2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

3. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

Foto-Foto Kegiatan :







### C. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	100%	95%	95%	setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR dan SIP sesuai kompetensi dan profesi, sementara untuk penertiban

sesuai dengan standar					STR di pusat dan SIP di kabupaten memerlukan proses waktu, sehingga sebagian tenaga kesehatan ada yang belum memiliki STR dan SIP karena proses penertiban dan perpanjangan.

2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

**Foto-Foto Kegiatan :**

















Rekapitulasi Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>LOKASI</b>	<b>BESARAN KONTRAK</b>	<b>NOMOR KONTRAK/KWITANSI</b>	<b>JANGKA WAKTU KONTRAK(TGL MULAI S.D AKHIR PEKERJAAN)</b>	<b>PENYEDIA</b>
1	Pembangunan Pagar Samping Puskesmas Tambang Ulang	Rp 199.21 1.700	65,5 meter	Puskesmas Tambang Ulang	Rp 177. 609.520	027/03/SPK/PK- PL/Dinkes/2023	60 hari (29 Agustus s/d 27 Oktober 2023)	CV. AGISNA
2	Pembangunan Pagar Depan Puskesmas Bumi Makmur	Rp 190.80 9.000	60 meter	Puskesmas Bumi Makmur	Rp 168. 800.541	027/09/SPK/PK- PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. SARABA DUA
3	Pembangunan LABKESDA (DAK)	Rp 3.716.787.959	487 M2	UPT Labkesda	Rp 3.29 4.463.063	027/01/SP/Tender/ Dinkes/2023	150 hari (21 Juli s/d 17 Desember 2023)	CV. RAUDAH
4	IPAL	Rp 274.14 3.915	1 unit	UPT Labkesda	Rp 272. 000.000	027/02/Brg- EP/2023	60 hari (12 Juni s/d 09 September 2023)	CV.ARDHANA WICAKSANA
5	Genset	Rp 157.62 0.000	1 unit	UPT Labkesda	Rp 150. 000.000	027/03/Brg- EP/2023	65 hari (13 Juli s/d 15 September 2023)	CV. RAJAWALI DIESEL

6	Rehabilitasi ringan gedung PSC	Rp 114.64 5.240	57 m2	Pelaihari (PSC)	Rp 101. 409.910	027/06/SPK/PK-PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. CAHAYA ANANDA
7	Rehabilitasi ringan gudang aset Dinkes	Rp 124.70 1.840	62 m2	Dinkes	Rp 109. 382.883		45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. AGISNA
8	Rehabilitas Ringan Pembangunan Poskesdes Handil Gayam	Rp 82.464 .120	41 m2	Poskesdes Handil Gayam	Rp 73.2 55.799	027/04/SPK/PK-PL/Dinkes/2023	60 hari (29 Agustus s/d 27 Oktober 2023)	CV. PUTRA BUMI MAKMUR
9	Rehabilitasi ringan Polindes Kayu Abang	Rp 130.73 5.800	65 m2	Polindes Kayu Abang	Rp 115. 406.084	027/12/SPK/PK-PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. INDAH SRI WIJAYA
10	Rehabilitasi sedang Poskesdes Pandan Sari	Rp 165.93 3.900	55 m2	Poskesdes Pandan Sari	Rp 147. 094.519	027/10/SPK/PK-PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. MEGAH
11	Rehab Poskesdes Sungai Baru	Rp 130.73 5.800	65 m2	Poskesdes Sungai Baru	Rp 109. 996.716	027/08/SPK/PK-PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. AZRIEL ATTALA RACHMAN
12	Pemasangan Plafon	Rp 25.541 .100	118 m2	Dinkes (gudang IFK)	Rp 21.4 23.000	INV-1700699360	Nomor :45260	ARSA ENGINEERING

13	Penambahan Daya Listrik	Rp 53.280 .000	2 paket	Puskesmas Panggung dan Durian Bungkuk	Rp 52.6 00.000	027/05/JL-EP/2023	30 hari (23 November s/d 22 Desember 2023)	PT Linggar Perdana Teknik
14	Belanja modal kendaraan bermotor khusus	Rp 1.799.698.500	2 unit	Puskesmas Bati-Bati dan Kait-Kait	Rp 625. 000.000	027/04/Brg- EP/2023	40 hari (23 Oktober s/d 30 November 2023)	PT. Mitra Megah Profitamas
15	proyector + Layar	Rp 13.179 .030	1 set	Puskesmas Panggung	Rp 11.5 00.000	INV-1700447126	Nomor :45250	ALFARIZ BERKAH MANDIRI
16	Partisi	Rp 6.798. 750	8,75 m2	Puskesmas Panggung	Rp 5.62 2.300	INV-1699243705	Nomor : 45252	ARSA ENGINERING
17	AC Split 1 PK	Rp 134.28 7.578	15 unit	Puskesmas Kurau, Tanjung Habulu, Bumi Makmur, Tirtajaya, Panyipatan dan Labkesda	Rp 91.2 16.216	027/01/Brg- EP/2023	30 hari (12 April s/d 11 Mei 2023)	CV DIAN SAMUDERA
18	Komputer PC	Rp 11.220 .624	1 set	Puskesmas Panggung	Rp 11.2 00.000	027/06/Brg- EP/2023	30 hari (23 November s/d 22 Desember 2023)	CONNECT COMPUTER NETWORK

19	Laptop	Rp 23.574 .047	2 unit	Puskesmas Panggung	Rp 23.0 00.000	027/06/Brg- EP/2023	30 hari (23 November s/d 22 Desember 2023)	CONNECT COMPUTER NETWORK
20	Pemasangan paving block puskesmas Panggung	Rp 41.958 .000	84 m2	Puskesmas Panggung	Rp 36.7 89.189	027/05/SPKPK- PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. SYABILLA AZZAHRA
21	Pemasangan paving block Pustu Martadah Baru	Rp 124.87 5.000	250 m2	Pustu Martadah Baru	Rp 109. 996.716	027/11/SPK/PK- PL/Dinkes/2023	45 hari (10 November s/d 24 Desember 2023)	CV. BAROKAH
22	Pembangunan Pustu Sungai Rasau	Rp 502.83 0.000	75 m2	Pustu Sungai Rasau	Rp 441. 002.613	027/02/SP/Tender/ Dinkes/2023	150 hari (26 Juli s/d 22 Desember 2023)	CV. REYSHAN ABADI
23	Pembangunan Pustu Lok Serapang	Rp 502.83 0.000	75 m2	Pustu Lok Serapang	Rp 441. 685.108	027/03/SP/Tender/ Dinkes/2023	105 hari (29 Agustus s/d 11 Desember 2023)	CV. NABIL
24	Pemasangan Paving Block Pustu Kandangan Lama	Rp 184.81 5.000	370 m2	Pustu Kandangan Lama	Rp 164. 905.331	027/02/SPK/PK- PL/Dinkes/2022	60 hari (24 Juli s/d 21 September 2023)	CV. AIMIKHA JAYA GROUP
25	Pemasangan Paving Block Puskesmas Tajau Pecah	Rp 197.30 2.500	395 m2	Puskesmas Tajau Pecah	Rp 176. 290.960	027/01/SPK/PK- PL/Dinkes/2023	60 hari (24 Juli s/d 21 September 2023)	CV. BERKAH TERANG RAHMAT

**e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6**

Sasaran strategis Nomor 6 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.19

Tabel Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke								
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran
		2022			2023					
<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama dan Paripurna	58%	0%	0%	68%	73%	107%	518,042,000	474,436,400	43,605,600
	2. Persentase Pelayanan kegawatdaruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	259,380,000	250,905,000	8,475,000
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	40%	0%	0%	50%	0,02%	0,03%	0	0	0

5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	52%	100%	192%	56%	100%	178%	71,943,192	50,290,000	21,653,192
6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	96,71%	97%	100%	94,51%	95%	55,633,441,068	55,568,439,868	65,001,200

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **80,37% dengan kategori Tinggi**. Adapun sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan 6 Indikator sasaran yang harus dicapai antara lain:

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan adalah terjaganya kualitas layanan dan peningkatan derajat atau tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang mana pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

1. Jumlah Puskesmas yang teakreditasi pada dinas kesehatan Tanah Laut tahun adalah sebanyak 22 Puskesmas. Dari 22 Puskesmas yang telah diakreditasi sampai tahun 2023 terdapat 9 Puskesmas dengan predikat kelulusan Paripurna, 7 Puskesmas dengan predikat kelulusan Utama, 3 Puskesmas dengan predikat kelulusan Madya, dan 3 Puskesmas belum terakreditasi dan akan diakreditasi tahun 2024. Berdasarkan target Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama pada tahun 2022 yakni sebanyak 11 Puskesmas (dari sebelumnya 7 puskesmas pada tahun 2021) atau sebesar 58%, ditambah dengan target 2 terakreditasi madya atau 10%, dan 6 dengan target terakreditasi Paripurna atau 32%, ternyata pada tahun 2023 terealisasi dengan capaian 9 Puskesmas terakreditasi Paripurna, 7 Puskesmas

terakreditasi Utama, 3 Puskesmas terakreditasi Madya, dan ada 3 Puskesmas baru yang belum terakreditasi, yang akan diakreditasi tahun 2024. Berdasarkan capaian di atas maka fasilitas kesehatan yang terakreditasi Paripurna pada tahun 2023 yakni sebanyak 9 Puskesmas dari 22 Puskesmas atau sebanyak 41%, yang *terakreditasi Utama* pada tahun 2023 yakni sebanyak 7 Puskesmas dari 22 Puskesmas atau sebanyak 31%, yang terakreditasi Madya pada tahun 2023 yakni sebanyak 3 Puskesmas dari 22 Puskesmas atau sebanyak 14% serta 3 Puskesmas Baru yang belum terakreditasi pada tahun 2023 yakni sebanyak 3 Puskesmas dari 22 Puskesmas atau sebanyak 14%, yang diperhitungkan berdasarkan rumus capaian = jumlah realisasi tahun 2023 dibagi target tahun 2023 dikali 100% atau dengan perhitungan  $16 \text{ Puskesmas (9 Paripurna + 7 Utama) : 22 Jlh Puskesmas} \times 100\% = 73\%$ . Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian target akreditasi Puskesmas tahun 2023 sudah melebihi capai target. hal ini disebabkan karena pendampingan dan pembimbingan untuk persiapan akreditasi pada tahun 2023 sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun ini tidak ada pelaksanaan survei karena adanya kebijakan pandemik covid 19. sehingga pada tahun 2023 pelaksanaan akreditasi Puskesmas dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Persentase Pelayanan kegawatdaruratan oleh Public Service Center (PSC) 119 Dinkes Kab. Tanah Laut 2023 adalah 138% yang diperhitungkan berdasarkan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2023 yakni sebanyak 1.385 kasus emergency yang ditangani dari terget 1000 kasus pada tahun 2023. Berdasarkan rumus Capaian = Realisasi : Target x 100%. Tingginya capaian Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC) 119 Dinkes Kab. Tanah Laut 2023 ini disebabkan banyaknya kebutuhan masyarakat akan layanan PSC 119 yang dapat ditangani/dilayani oleh Tim PSC 119 Dinkes Kab. Tanah Laut.
3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD adalah 100% dari target 100% realisasi 100%.. dengan capaian 100% rumusnya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang berstatus BLUD dibagi Jumlah Fasilitas Kesehatan

yang ada di Kabupaten Tanah Laut dikalikan 100% maka 22 Fasilitas Kesehatan dibagi 22 Faskes dikali 100% didapatkan 100%.

4. Di tahun 2023 ada 2 (Dua) Desa yang berhasil memenuhi standar IKS kategori sehat dari total jumlah keseluruhan 135 Desa, sehingga realisasi tahun 2023 0,015 % dari target 50 % dengan capaian 0,03 %. Jika membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yang mana realisasi 0% dari target 25 % dan capaiannya pun juga 0 %. Dan di tahun 2022 realisasi juga masih 0 % dari target 40 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian jangka menengah tahun 2023 tercapai sebesar 0,03 %. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut yaitu masih sering errornya aplikasi dari Keluarga Sehat itu sendiri yang mana seringkali entry data intervensi tidak dapat dilakukan, sehingga pengentryan data tidak bisa sampai selesai dan tidak tersimpan, yang berakibat IKS tidak naik, dan ada beberapa kasus data-data yang telah di entry hilang, saat migrasi data (Update Versi Aplikasi Keluarga Sehat terbaru) dan tidak bisa dikembalikan, dalam kata lain harus di entry ulang. Belum terintegrasinya / terbridgingnya aplikasi Keluarga Sehat dengan Dukcapil sehingga isian data harus manual dan Aplikasi sering mengalami kendala dalam pelaporan IKS Tk.KK. Kurangnya SDM di Puskesmas sehingga pemegang program PIS-PK selalu merangkap-rangkap sebagai pemegang program-program yang lain, dan seringnya masyarakat tidak berada di rumah pada saat jadwal kunjungan rumah / masyarakat tidak kooperatif, sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang untuk kunjungan rumah sedangkan petugas juga terbentur dengan kegiatan-kegiatan dari program-program lain di Puskesmas, disamping itu faktor terbesar lainnya yaitu Kebiasaan pola hidup masyarakat yang sulit dirubah, dan masih ada daerah yang belum mempunyai akses/sarana air bersih dan jamban, masih ada keluarga yang merokok, dll sehingga belum dapat mencapai standar 12 indikator IKS. Untuk itu perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan kerja sama lintas sektor untuk ketercapaian kegiatan dan juga kerjasama lintas program sehingga bisa dilakukan sanding data. Untuk anggaran yang

berkaitan dengan kegiatan tersebut juga tidak adalagi di tahun 2022 dan 2023, sehingga ada keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Persentase jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (Asman TOGA) di Desa. Pada tahun 2021 realisasi sebesar 100 % dari target 48%. Pada tahun 2022 target di naikkan menjadi 52 % dan realisasi berhasil mencapai 100 %. Dan pada tahun 2023 target dinaikkan lagi menjadi 56 % dan realisasi berhasil kembali mencapai 100 %. sehingga capaian kinerja mencapai sebesar 178 %. Hal ini telah melebihi target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 56 %. Ketercapaian ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, baik dukungan dari lintas sektor, giatnya petugas Puskesmas yang melakukan pembinaan meskipun semua Puskesmas tidak memiliki alokasi dana / anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program Kestrada, dan khususnya masyarakat yang mengerti akan manfaat tanaman obat keluarga untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan tanpa ada efek samping, dan tentunya lebih hemat jika dibandingkan dengan obat-obat kimia.
6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN pada tahun 2023 adalah 94,51 % dari target 100 % realisasi 94,51 % dengan capaian 95 %, rumusnya adalah jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah penduduk kabupaten Tanah Laut dikalikan 100% maka didapatkan persentasi penduduk yang menjadi peserta JKN dengan perhitungan  $\frac{360.967 \text{ jiwa}}{341.164 \text{ jiwa}} \times 100\%$  didapatkan 94,51%.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 9 PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, 3 orang subkoordinator (yang terdiri dari 1 subkoordinator yankes rujukan, 1 subkoordinator yankes primer-tradisional, dan 1 subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan), 2 analis, dan 3 pengelola pelayanan kesehatan. Didukung sebanyak 2 tenaga PTTD.

Kepala Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 82,6% dengan realisasi anggaran rata rata 58,3% dari pagu anggaran sebesar 59.451.764.720 sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Pelayanan Kesehatan rata - rata sebesar 4,6% dari PROGRAM : program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. KEGIATAN : penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas yankes tingkat daerah kab/kota, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan, serta SUB KEGIATAN perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas yankes tingkat daerah kab/kota, pelaksanaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, pengelolaan pelayanan kes.tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan sistem informasi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana, yang mana kesemuanya ini merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Tabel. 3.20

Tabel Penjelasan Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis 6

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja				
			Anggaran	Realisasi	efisiensi anggaran	Keterangan mencapai/tidak mencapai
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	9.728.420.850	7.647.565.058	2.080.855.792	1 unit ambulance untuk RS Bumi Makmur tidak terealisasi di karenakan tidak tersedia/tidak sesuai dengan spek

		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	32.703.517.265	27.030.467.044	5.673.050.221	anggaran belanja pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas masih belum mencukupi
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	4.043.837.467	3.826.204.486	217.632.981	keterbatasan kemampuan penyedia untuk menyediakan obat dan bhmp yang akan diadakan , keterbatas waktu pengadaan karena anggaran perubahan
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	11.640.310.062	8.244.918.400	3.395.391.662	anggaran untuk membayar honor ptt baru beserta iuran jaminan kesehatan,kecelakaan dan kematian dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga di puskesmas tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan pemerintah yang tidak membolehkan pengangkatan Non ASN baru

#### A. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

##### 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala

##### 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

1.	Jumlah kepesertaan JKN yang dibiayai oleh Pemda	100%	99,88%	100 %	Pemda tetap berkomitmen untuk mempertahankan kabupaten dengan Universal Health Coverage (UHC).
----	---	------	--------	-------	--

3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

**Foto-Foto Kegiatan :**





## B. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

### 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	50 %	0,015 %	0,03 %	sering errornya aplikasi dari Keluarga Sehat itu sendiri yang mana seringkali entry data intervensi tidak

				<p>dapat dilakukan, sehingga pengentryan data tidak bisa sampai selesai dan tidak tersimpan, yang berakibat IKS tidak naik, dan ada beberapa kasus data-data yang telah di entry hilang, saat migrasi data (Update Versi Aplikasi Keluarga Sehat terbaru) dan tidak bisa dikembalikan, dalam kata lain harus di entry ulang. Belum terintegrasinya / terbridgingnya aplikasi Keluarga Sehat dengan Dukcapil sehingga isian data harus manual dan Aplikasi sering mengalami kendala dalam pelaporan IKS Tk.KK. Kurangnya SDM di Puskesmas</p>
--	--	--	--	--

					<p>sehingga pemegang program PIS-PK selalu merangkap-rangkap sebagai pemegang program-program yang lain, dan seringkali masyarakat tidak berada di rumah pada saat jadwal kunjungan rumah / masyarakat tidak kooperatif, sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang untuk kunjungan rumah sedangkan petugas juga terbentur dengan kegiatan-kegiatan dari program-program lain di Puskesmas, disamping itu faktor terbesar lainnya yaitu Kebiasaan pola hidup masyarakat yang sulit dirubah, dan masih ada daerah yang belum mempunyai</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>akses/sarana air bersih dan jamban, masih ada keluarga yang merokok, dll sehingga belum dapat mencapai standar 12 indikator IKS. Untuk itu perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan kerja sama lintas sektor untuk ketercapaian kegiatan dan juga kerjasama lintas program sehingga bisa dilakukan sanding data. Untuk anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut juga tidak adalagi di tahun 2022 dan 2023, sehingga ada keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan.</p>
--	--	--	--	--	---

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehataqn Tradisional yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehataqn Tradisional yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56 %	100 %	178 %	Dengan lebih meningkatkan dan menguatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengani lintas sektor, memberikan arahan dan motivasi kepada petugas untuk lebih giat melakukan pembinaan ke desa meskipun semua Puskesmas tidak memiliki alokasi dana / anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program Kestrad, dan

					<p>utamanya dinkes sendiri juga terjun langsung ke desa-desa untuk memberikan pembinaan, pendampingan kepada masyarakat desa dengan bekerjasama dengan petugas puskesmas. Dan lebih sering memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat agar mengerti akan manfaat tanaman obat keluarga untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan tanpa ada efek samping, dan tentunya lebih hemat jika dibandingkan dengan obat-obat kimia.</p>

### Foto-Foto Kegiatan :





















C. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	72.217.200	26.268.750	36,37%	Pada RKA 2023 semua kegiatan dianggarkan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota, sehingga dilakukan pergeseran pada bulan Juli 2023 dengan pergeseran beberapa anggaran menjadi kegiatan pertemuan dan pembinaan, namun masih terdapat anggaran perjadi sebesar Rp. 48.260.000,-. KEGIATAN PADA PERJALANAN INI YANG SEBAGIAN BESARNYA TIDAK DAPAT TERSERAP/TEREALISASI
2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84.109.434	12.789.250	15,2%	Pada Dana APBD sisa dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.593.750,- yang merupakan anggaran untuk kegiatan Perjadi Visitasi perizinan dan pengawasan apotek, toko obat dan optik. Dikarenakan sebagian besar pendirian apotek dan

					<p>toko obat berada di wilayah pelaihari sehingga perjadi tidak dapat digunakan</p> <p>Untuk dana BPOM UMOT 2023 tidak dapat dipergunakan seluruhnya dikarenakan anggaran baru masuk pada SIPD disekitar bulan Agustus dan kegiatan relatif sama dengan kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD sehingga kegiatan tidak dilaksanakan karena secara fisik, target dan sasaran kegiatan telah terlaksana atau tercover dengan dana APBD yang telah lebih dahulu direncanakan dan disalurkan</p>
--	--	--	--	--	---

## 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	259.38 0.000	250.905.0 00	96,73%	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan
4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.200. 252.26 7	935.484.0 00	77,94%	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan

5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	518.04 2.000	474.436.4 00	91.58%	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan
---	--	-----------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
	Tidak ada				

### Foto-Foto Kegiatan :













4. Eselon IV

o Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3

Tabel. 3.15

Capaian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %

1.	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan</b>	1 Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4 dokumen	4 dokumen	100%
		2 Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	2 dokumen	2 dokumen	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100 %</b>

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **100% dengan kategori sangat baik**

**Sasaran strategis meliputi :**

**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan yang meliputi :**

- a. Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar yang terdiri dari 4 dokumen pada subbag perencanaan dan pelaporan yakni DPA, DPA Perubahan, Renja dan Renja Perubahan dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 100%.
- b. Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar yang terdiri dari 2 dokumen pada subbag perencanaan dan pelaporan yakni Laporan Kinerja/ Lkj dan Profil Dinas Kesehatan dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 100%.

Kasubbag Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 5 PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dan 4 orang staf. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 39.401.248 dari pagu anggaran Rp. 80.694.449

dengan rata rata 49% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Subbag Keuangan rata - rata sebesar 51 % dari 1 Program 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

1. Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4 dokumen	4 dokumen	100%	pembuatan dokumen berlangsung dengan baik dengan
1	Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	2 dokumen	2 dokumen	100%	pembuatan dokumen berlangsung dengan baik dengan

2. Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang mencapai target

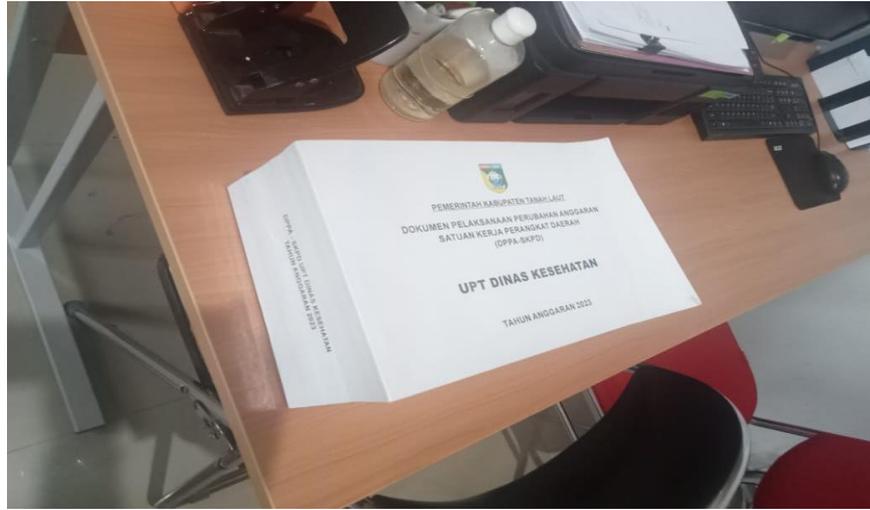
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

3. Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

**Foto-foto kegiatan :**





o **Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2**

Tabel. 3.14

Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Dukungan Keuangan dan Pencatatan Aset	<b>Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Keuangan dan Aset</b>			
		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100
		2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	1026	93

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **97%**

**dengan kategori sangat baik**

**Meningkatnya Dukungan Keuangan dan Pencatatan Aset meliputi : Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Keuangan dan Aset yang terdiri dari :**

A.Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun sesuai SOP adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 Dokumen pada Tahun 2023 yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (Calak), yang mencakup informasi keuangan dan aset berdasarkan laporan bulanan.

B.Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah 1026 orang dari target 1100 di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Kasubbag Keuangan dan Penatausahaan Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsiya didukung dengan SDM yang cukup

berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 9 PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Keuangan dan Penatausahaan Aset, 1 orang Analis Keuangan, 1 orang Pengelola Keuangan, 1 orang Bendahara, 2 orang verifikator keuangan, 1 orang pengadministrasian keuangan, 2 orang pengelola pemanfaatan Barang Milik Daerah. Kasubbag Keuangan dan Penatausahaan Aset telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 97% dengan realisasi anggaran Rp 101.360.656.656,00 dari pagu anggaran Rp 121.382.528.563,00 dengan rata rata 83,50% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Subbag Keuangan dan Penatausahaan Aset rata - rata sebesar 16,5 % dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kasubbag Keuangan dan Penatausahaan Aset.

1. Subbag Keuangan dan Aset yang tidak mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kendala
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	1026	93	

2. Subbag Keuangan dan Aset yang mencapai target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi
1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	1	1	100	-

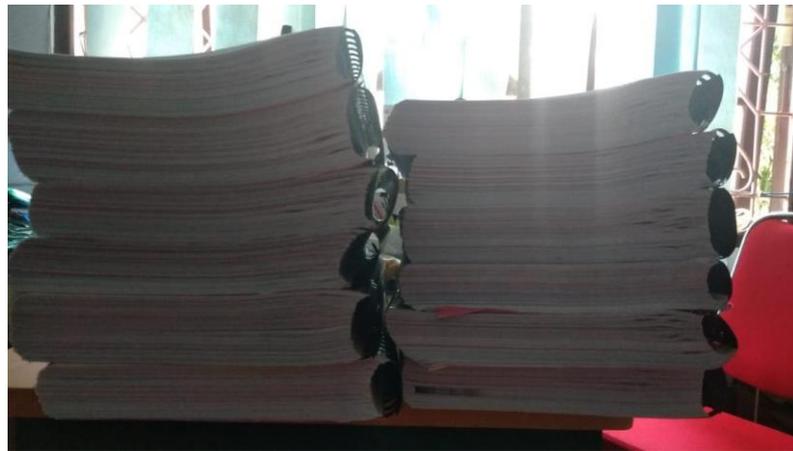
	si Keuangan SKPD				
--	---------------------	--	--	--	--

3. Subbag Keuangan dan Aset yang melebihi target

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Strategi

**Foto-foto kegiatan 2023 :**

1. Laporan Keuangan



2. Laporan Aset



### 3. Foto Pertemuan





o **IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1**

Tabel. 3.13

Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	<b>Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran</b>	1 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	10	10	100%
		2 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar	63	63	100%
		3 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	63	63	100%
2.	<b>Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian</b>	1 Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP	993	993	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100%</b>

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **100 % dengan kategori sangat baik**

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administasi perkantoran adalah meliputi :

1. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP adalah SOP kepegawaian, SOP Umum, dan SOP alur pelayanan. dari 10 target ke 10 realisasi dengan capaian 100%, rumusnya adalah target dengan realisasi sama perbandinganya yang didapat maka capaian yang didapat 100% . Untuk perbandingan pada tahun 2023 segala target dan realisasi meningkat dari yang jumlah pelayanan administrasi perkantoran 2022 berjumlah 3 untuk 2023 bertambah 10.
2. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar yaitu Mobil Dinas 20 Unit, Printer 10 Unit, Komputer/Laptop 10 Unit, AC 12 Unit, Gedung 11 Unit (Gedung Yankes, P2, Sekre, SDK, Mushola, Aula, Kadis, Gudang Aset, Gudang Rumah, Parkiran) adalah dari terget 63 realisasi 63 dengan capaian 100% rumusnya adalah target dengan realisasi sama perbandinganya yang didapat maka capaian yang didapat 100%. Untuk perbandingan pada tahun 2023 segala target dan realisasi meningkat dari yang jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar 2022 berjumlah 10 untuk 2023 bertambah 63.
3. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara Mobil Dinas 20 Unit, Printer 10 Unit, Komputer/Laptop 10 Unit, AC 12 Unit, Gedung 11 Unit (Gedung Yankes, P2, Sekre, SDK, Mushola, Aula, Kadis, Gudang Aset, Gudang Rumah, Parkiran) adalah dari target 63 realiasi 63 dengan capaian 100%, rumusnya adalah target dengan realisasi sama perbandinganya yang didapat maka capaian yang didapat 100%. Untuk perbandingan pada tahun 2023 segala target dan realisasi meningkat dari yang jumlah sarana

dan prasarana perkantoran yang dipelihara pada tahun 2022 berjumlah 48 untuk 2023 bertambah 63

2. Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian sesuai SOP adalah meliputi :

1. Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP adalah dari terget 993 realiasi 993 dengan capaian 100% terdiri dari kepala dinas 1 pegawai, sekretaris 1, kepala bidang 7, kepala sub bagian 9, staf pelaksana 94 dan staf jabatan fungsional tertentu 881. rumusnya adalah target dengan realisasi sama perbandinganya yang didapat maka capaian yang didapat 100%. Untuk perbandingan pada tahun 2023 segala target dan realisasi meningkat dari yang jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP pada tahun 2022 berjumlah 860 orang dan pada tahun 2023 berjumlah 993 orang.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 4 PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pengelola kepegawaian, pengadministrasi kepegawaian dan pranata komputer, pengemudi. Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 77 % dengan realisasi anggaran Rp. 2.407.361.989 dari pagu anggaran Rp 3.119.920.142 dengan rata rata 77 % sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Subbag Umum dan Kepegawaian rata - rata sebesar 77 % dari 1 Program 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Untuk realisasi listrik air, pada Rsud bumi Makmur beum tercapai karena belum ada bangunan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

No	Sub kegiatan	CAPAIAN KEUANGAN UMPEG			CAPAIAN FISIK UMPEG				
		Pagu	JAN S.D DESEMBER	REALIS ASI	Indikator		Realisasi TW 4 (sd Desember)		
					Targ et	Satuan	Real isasi	Satuan	%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 13,999,150	Rp 13,960,000	100%	277	Orang	277	Orang	100.00 %
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 64,864,624	Rp 47,873,500	74%	12	lap	12	lap	100.00 %
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 42,990,723	Rp 35,626,071	83%	14	Paket	14	Paket	100.00 %
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 81,048,788	Rp 73,511,616	91%	4	Paket	4	Paket	100.00 %
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2,664,000	Rp 2,400,000	90%	12	dok	12	dok	100.00 %
6	Penyediaan Bahan/Material	Rp 20,000,000	Rp 19,998,000	100%	2	Paket	2	Paket	100.00 %
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 462,937,838	Rp 449,107,673	97%	12	lap	12	lap	100.00 %
8	Pengadaan Mebel	Rp 5,994,000	Rp 4,872,000	81%	2	Unit	2	Unit	100.00 %
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 401,444,415	Rp 212,739,959	53%	3	lap	3	lap	100.00 %
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1,789,211,604	Rp 1,315,434,220	74%	11	lap	11	lap	100.00 %
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 210,900,000	Rp 210,844,950	100%	20	unit	20	unit	100.00 %
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23,865,000	Rp 20,994,000	88%	4	jenis	4	jenis	100.00 %
TOTAL		Rp3,119,920,142	Rp 2,407,361,989	77%					

**Foto-foto Kegiatan 2023:**



Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja Tahun 2023  
Teknis pada UPT Puskesmas

Kegiatan Bimbingan



Kegiatan Bimbingan Teknis pada UPT Puskesmas



Pameran Expo HUT Tanah  
Laut Tahun 2023



Disiplin Pegawai



Pembinaan terhadap pegawai PTT



Turdes Insting 2023

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Pada Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut dan Dana Alokasi Umum (DAK) melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk pagu anggaran Dinas Kesehatan induk sebesar **Rp. 249,961,585,112,00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 218,153,016,384,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **87.27%**, dengan realisasi Fisik Kinerja **98,85 %** dengan kondisi anggaran terakhir adalah **SILPA sebesar Rp. 31,808,568,728,00** demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2023 dengan Kategori **Baik**, dan untuk Pagu Keseluruhan Dinas Kesehatan dengan 22 UPT (Puskesmas), 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan 1 UPT Instalasi Farmasi sebesar **Rp. 295,406,134,882,00** dengan realisasi **Rp. 251,126,965,936,00** atau dengan capaian Keuangan **85,01%** dan dengan realisasi Fisik **98,85%**

**Tabel 3.1**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Keseluruhan Tahun 2023**

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>295,406,134,882</b>	<b>251,126,965,936</b>	<b>85.01</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>248,462,985,547</b>	<b>200,924,576,278.00</b>	<b>80.87</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>121,312,528,834</b>	<b>105,019,924,109.00</b>	<b>86.57</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	<b>76,817,053,446</b>	<b>64,086,720,699.00</b>	<b>83.43</b>
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44,495,475,388	40,933,203,410.00	91.99
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>126,535,356,713</b>	<b>95,289,552,169.00</b>	<b>75.31</b>
Belanja Barang	13,852,771,343	7,044,267,993.00	50.85
Belanja Jasa	76,587,434,919	68,070,625,808.00	88.88
Belanja Pemeliharaan	1,075,552,800	981,767,394.00	91.28
Belanja Perjalanan Dinas	10,368,167,838	1,629,445,173.00	15.72
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	109,000,000	109,000,000.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	24,542,429,813	17,454,445,801.00	71.12
<b>Belanja Hibah</b>	<b>615,100,000</b>	<b>615,100,000.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Hibah kepada BUMD	615,100,000	615,100,000.00	100.00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>248,462,985,547</b>	<b>200,924,576,278.00</b>	<b>80.87</b>

<b>BELANJA MODAL</b>	<b>46,943,149,335</b>	<b>37,208,925,436.00</b>	<b>79.26</b>
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>49,446,250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Belanja Modal Tanah BLUD	49,446,250	0.00	0.00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>40,338,916,979</b>	<b>31,485,715,306.00</b>	<b>78.05</b>
Belanja Modal Alat Besar	274,143,915	272,000,000.00	99.22
Belanja Modal Alat Angkutan	1,826,456,160	651,240,000.00	35.66
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,930,148,331	2,782,885,853.00	94.97
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	157,620,000	150,000,000.00	95.17
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30,800,714,048	25,264,892,640.00	82.03
Belanja Modal Alat Laboratorium	1,583,479,237	960,360,936.00	60.65
Belanja Modal Komputer	50,535,403	48,361,900.00	95.70
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2,715,819,885	1,355,973,977.00	49.93
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>6,441,414,606</b>	<b>5,723,210,130.00</b>	<b>88.85</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung	6,051,393,906	5,376,800,069.00	88.85
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	390,020,700	346,410,061.00	88.82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0.00	0.00
<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0.00	0.00
Belanja Modal Instalasi	0	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya	113,371,500	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	113,371,500	0.00	0.00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>46,943,149,335</b>	<b>37,208,925,436.00</b>	<b>79.26</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>295,406,134,882</b>	<b>251,126,965,936</b>	<b>85.01</b>

**Tabel 3.2**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN KESELURUHAN TAHUN 2022 DAN 2023**

NO	INSTANSI	2022			2023			
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	% Keu	% FISIK
1	Dinas Kesehatan	217,492,266,569	190,846,386,311	87.75	249,961,585,112	218,153,016,384	87.27	95
2	Balai Laboratorium Kesehatan	466,351,830	217,303,365	46.60	121,362,000	57,027,838	46.99	96
3	Instalasi Farmasi	385,083,736	323,112,342	83.91	337,531,996	97,533,655	28.90	100
4	Puskesmas Angsau	2,523,819,488	1,925,330,579	76.29	2,906,630,761	2,384,017,299	82.02	90
5	Puskesmas Asam-Asam	2,106,551,046	1,552,197,909	73.68	2,257,885,000	1,644,396,968	72.83	88
6	Puskesmas Batakan	2,950,624,283	1,798,055,196	60.94	2,341,501,642	1,384,233,044	59.12	72
7	Puskesmas Bati-Bati	3,268,600,351	2,340,100,984	71.59	2,544,433,000	1,999,847,916	78.60	88
8	Puskesmas Bentok Kampung	705,378,248	558,641,276	79.20	1,100,986,770	951,479,093	86.42	100
9	Puskesmas Bumi Makmur	2,289,175,713	1,814,172,335	79.25	2,517,289,000	1,829,244,999	72.67	77
10	Puskesmas Durian Bungkok	838,698,954	400,532,663	47.76	953,700,000	758,119,286	79.49	100
11	Puskesmas Jorong	2,019,243,735	1,427,611,203	70.70	1,941,587,980	1,411,583,743	72.70	91
12	Puskesmas Kait-Kait	1,353,589,480	877,137,790	64.80	1,173,955,270	838,079,552	71.39	81
13	Puskesmas Kintap	2,906,901,169	2,085,988,072	71.76	2,449,929,000	1,914,972,659	78.16	81
14	Puskesmas Kurau	1,327,159,752	770,841,819	58.08	1,424,931,000	1,017,032,999	71.37	86
15	Puskesmas Padang Luas	1,623,602,034	933,034,079	57.47	2,028,755,260	1,117,074,105	55.06	84
16	Puskesmas Panggung				338,804,000	286,555,371	84.58	100
17	Puskesmas Panyipatan	2,061,947,107	1,475,571,823	71.56	2,386,376,259	1,845,381,637	77.33	81
18	Puskesmas Pelaihari	3,698,271,908	3,059,120,171	82.72	3,925,257,800	2,565,483,579	65.36	68
19	Puskesmas Sungai Cuka	1,637,295,095	1,306,948,070	79.82	1,794,405,610	1,253,745,939	69.87	75
20	Puskesmas Sungai Riam	1,222,429,397	1,013,698,383	82.92	1,117,213,500	908,462,688	81.32	95
21	Puskesmas Tajau Pecah	2,626,181,578	2,153,486,348	82.00	2,364,549,393	1,526,964,275	64.58	88
22	Puskesmas Takisung	3,671,885,631	3,084,123,750	83.99	4,376,033,279	3,568,761,639	81.55	100
23	Puskesmas Tambang Ulang	2,348,825,987	1,555,245,558	66.21	2,390,952,720	1,672,883,334	69.97	86
24	Puskesmas Tanjung Habulu	1,290,184,455	803,287,569	62.26	981,182,000	692,212,724	70.55	71
25	Puskesmas TirtaJaya	1,766,146,201	1,374,956,994	77.85	1,669,296,530	795,869,787	47.68	100
	<b>TOTAL</b>	<b>262,580,213,747</b>	<b>223,696,884,589</b>	<b>85.19</b>	<b>295,406,134,882</b>	<b>251,126,965,936</b>	<b>85.01</b>	<b>98,85</b>

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Ibu melahirkan dan anak serta gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	100%	77.7%	77.7%
			Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	100%	86.9%	86.9%
			Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	100%	89.4%	89.4%
			Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%	84.6%	84.6%
	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Rumah Tangga berPHBS	60%	50.8%	84.7%
			Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat sehat	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan		Persentase desa STBM	100%	100%	100%
			Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	57.14%	71.42%
			Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	61.38%	87.68%
	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	22.72%	22.72%
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	22.72%	22.72%
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	87.1%	87.1%
			Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	3 desa	2.22
Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)			100%	114 desa UCI	84.44	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama (dan Paripurna)	68%	73%	107%

	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	50%	0.015%	0.0%
		Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%	100%	178.6%
		Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	94.51%	94.5%
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	80%	80%	100.0%
		Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	55.42%	55.4%
		Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	100%	90%	90.0%
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100.0%
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100.0%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100.0%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100.0%
		Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100.0%
		Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100.0%
		Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	74	81.5	110%

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Untuk Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah dimana terdapat perbedaan dalam jumlah program maupun kegiatan, untuk Tahun 2023 Dinas Kesehatan melaksanakan Kegiatan dengan 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan sedangkan untuk Tahun 2022 Dinas Kesehatan hanya dengan 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan

#### 1. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse ntase Keua ngan (%)	Capa ian Kine rja (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	217,492,266,569	190,846,386,311	88%	96.10%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,694,449	39,401,248	49%	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112,467,460,614	99,242,274,645	88%	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,155,000	44,836,250	45%	76.98%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	825,905,592	664,616,409	80%	95.71%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205,081,075	201,448,000	98%	100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,129,560,511	1,534,666,114	72%	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,750,000	242,589,952	97%	100.00%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>89,503,818,570</b>	<b>80,238,178,510</b>	<b>90%</b>	<b>76.73%</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24,443,274,131	20,069,539,754	82%	87.22%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,687,980,602	59,848,631,006	93%	50.91%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	372,563,837	320,007,750	86%	92.05%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>11,930,840,758</b>	<b>8,638,375,183</b>	<b>72%</b>	<b>100.00%</b>
Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,930,840,758	8,638,375,183	72%	100.00%

## 2. Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	KIne rja %
<b>DINKES</b>		<b>249,961,585,112</b>	<b>218,153,016,384</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>124,572,387,092</b>	<b>107,537,386,428</b>	<b>86%</b>	<b>98%</b>
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,938,387	34,101,230	49%	100%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121,382,528,563	105,096,423,209	87%	100%
II I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,999,150	13,960,000	100%	100%
I V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674,505,973	628,016,860	93%	83%
V I	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,994,000	4,872,000	81%	100%
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,190,656,019	1,528,174,179	70%	100%
V I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,765,000	231,838,950	99%	100%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>111,796,599,237</b>	<b>100,984,232,706</b>	<b>90%</b>	<b>96%</b>
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,871,515,582	38,708,464,520	83%	100%
II	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	8,742,440	5,875,000	67%	100.00%
II I	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,952,232	195,663,750	46%	100%
I V	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,491,388,983	62,074,229,436	96%	89%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>12,946,148,033</b>	<b>9,310,885,300</b>	<b>72%</b>	<b>85%</b>

	I	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,935,350,062	8,527,158,400	71%	84%
	II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,010,797,971	783,726,900	78%	87%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>361,893,945</b>	<b>108,073,750</b>	<b>30%</b>	<b>97%</b>
	I	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116,913,300	54,213,500	46%	100%
	II	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84,109,434	12,786,250	15%	86%
	II I	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,100,000	10,100,000	100%	100%
	I V	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150,771,211	30,974,000	21%	100%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>284,556,805</b>	<b>212,438,200</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,222,565	45,930,440	50%	100%
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,999,240	44,897,760	100%	100%
	II I	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	147,335,000	121,610,000	83%	100%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dinas kesehatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dinas kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran hasil kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2023, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria sangat berhasil yaitu Prevalensi Gizi Stunting, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) sedangkan 2 (dua) sasaran tidak berhasil yaitu Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 206,98 % atau bisa dikatakan secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Berhasil, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 (rata-rata capaian 84,4%).

Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). Hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini. Paling banyak penyebab kematian bayi adalah penyebab lainnya, ini menunjukkan kompleksnya bentuk komplikasi yang mungkin dialami anak selama periode bayi (0-11 bulan), salah satunya adalah kurang optimalnya dalam penanganan gizi sejak dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dan 30 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hasil analisis 8 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 rata-rata terkategori 73,17% dengan kategori sedang, mengalami penurunan dari tahun 2022 kategori tinggi (85%).

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dari Anggaran Rp. 295,406,134,882,- terealisasi sebesar Rp. 251,126,965,936 (85.01%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 23.213.552.325 terealisasi Rp. 18.455.635.062,33 (79,50 %).

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dari hasil capaian kinerja yang ada, maka strategi untuk peningkatan capaian kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Peningkatan promosi kesehatan dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan kesehatan, mengaktifkan Desa Siaga terutama menggairahkan kembali Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang efektif menggerakkan program kesehatan di desa.
4. Diperlukan keberadaan dan aktivitas konkrit pelaku pembangunan kesehatan untuk lebih menggalakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Hal ini diperlukan sinergisme, kemitraan serta koordinasi di antara pelaku pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi di daerah yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Pelaihari, 2 Februari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**

NIP. 19740612 200501 2 016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

KABUPATEN : Tanah Laut  
 Nama SKP : DINAS KESEHATAN  
 TUGAS : Bidang Kesehatan  
 FUNGSI : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah  
 a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan  
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan  
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan  
 d. Pelaksanaan administrasi dinas  
 e. Pembinaan UPT Dinas  
 f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup  Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup  Prevalensi stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kematian Bayi : Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu Dibagi Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama X 1.000 Kelahiran Hidup.</li> <li>• Angka Kematian Ibu : Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu di Bagi Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama X 100.000 Kelahiran Hidup.</li> <li>• Prevalensi Gizi Stunting : Jumlah balita stunting (dengan indikator antropometri pendek dan sangat pendek) di suatu wilayah pada periode waktu tertentu di Bagi Jumlah balita di suatu wilayah pada periode waktu yang sama X 100.</li> </ul>	Kabid Kesmas dan Kabid Yankes	Data Profil dan survey Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Indeks keluarga sehat  Indeks Kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keluarga Sehat adalah Nilai rata-rata indikator Keluarga sehat yang didapat dari kunjungan dan wawancara ke keluarga yang didata.</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat : Jumlah rata-rata nilai indikator pelayanan kesehatan yang diberikan responden di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. nilai interval 25 sd 100 dimana mutu pelayanan tidak baik bila nilai interval konversi 25-64,99 Mutu pelayanan Kurang Baik biulanilai interval konversi 65-76,6 Mutu Pelayanan Baik bila nilai interval konversi 76,61-88,3. Mutu pelayanan sangat baik bila nilai konversi 88,31 - 100</li> </ul>		

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH**



ALFIRIAL. SH. MH

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.1/147/ LHE- AKIP/Insp/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.:  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut  
di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 231 / Insp/ 2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD
  - b. Renja SKPD
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  - d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - e. Perjanjian Kinerja (PK)
  - f. Cascading/ Pohon Kinerja
  - g. Laporan Kinerja
  - h. Dokumen lain yang mendukung.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 81.50 dengan kategori **A** (Memuaskan), yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
- a. *Perencanaan Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 24,60 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **A (memuaskan)**.
  - b. *Pengukuran Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 26.10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **A (memuaskan)**.
  - c. *Pelaporan Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 11.5 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal*  
Diperoleh nilai sebesar 19,25 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.  
Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 100 %.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja :**

Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun, dapat dipertahankan dan tetap melakukan perbaikan atau penyempurnaan guna mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik apabila diperlukan.

**b. Pengukuran Kinerja :**

Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja :**

- 1). Agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun terakhir.
- 2). Agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran secara lengkap pada setiap analisis capaian Program.
- 3) Agar dilakukan reuiu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :**

- 1). Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sebagai bentuk pengendalian kinerja pada level dibawahnya dibuktikan dengan terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Inspektur,  


Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

UNIT KERJA :

: DINAS KESEHATAN

PERIODE EVALUASI

: 2022

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	A	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	A	5.40	90.00%
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	BB	7.20	80.00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan ( <i>Cascading</i> )				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( <i>Crosscutting</i> ).				

10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15.00</b>	<b>BB</b>	<b>12.00</b>	<b>80.00%</b>
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>	<b>A</b>	<b>26.10</b>	<b>87.00%</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6.00</b>	<b>A</b>	<b>5.40</b>	<b>90.00%</b>
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
<b>2.b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9.00</b>	<b>BB</b>	<b>7.20</b>	<b>80.00%</b>
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				

<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15.00</b>	<b>A</b>	<b>13.50</b>	<b>90.00%</b>
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15.00</b>	<b>BB</b>	<b>11.55</b>	<b>77.00%</b>
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3.00</b>	<b>BB</b>	<b>2.40</b>	<b>80.00%</b>
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya</b>	<b>4.50</b>	<b>B</b>	<b>3.15</b>	<b>70.00%</b>
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				

5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan				
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7.50</b>	<b>BB</b>	<b>6.00</b>	<b>80.00%</b>
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25.00</b>	<b>BB</b>	<b>19.25</b>	<b>77.00%</b>
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5.00</b>	<b>A</b>	<b>4.50</b>	<b>90.00%</b>
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
<b>4.b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7.50</b>	<b>BB</b>	<b>6.00</b>	<b>80.00%</b>
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				

2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
<b>4.c</b>	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja</b>	<b>12.50</b>	<b>B</b>	<b>8.75</b>	<b>70.00%</b>
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100.00</b>	<b>A</b>	<b>81.50</b>	<b>81.50%</b>

Pengendali Teknis



Hj. Rusmiati, MM  
NIP. 19651028 198602 2 005

Evaluator



Yunistriana, SH  
NIP. 19880401 201903 2 008

Mengetahui :  
Irbani II



Drs. H. A. Amirul Wafa  
NIP. 19660409 199203 1 010

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**  
**Untuk Penilaian Tahun 2022**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun, dapat dipertahankan dan tetap melakukan perbaikan atau penyempurnaan guna mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik apabila diperlukan.	Melakukan perbaikan dan Penyempurnaan dokumen perencanaan untuk penajaman target indicator Kinerja Utama pada Rencana Kerja terhadap pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD	Dokumen Renja Perbaikan	1 Minggu (Bulan Juni 2023)	Perbaikan/ Penajaman target dalam Dokumen Renja
2	Agar dilakukan Monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala kendala dalam pencapaian target dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Akan dilakukan monitoring secara berkala secara berjenjang atas Data capaian kinerja dan renaksi dikumpulkan per triwulan untuk melihat kemajuan dan situasi kegiatan	Evaluasi Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	1 Minggu (Bulan Juni)	Dokumen Kinerja dapat di evaluasi pencapaiannya
3.	1. Agar menginfokan analisis dan Evaluasi realisasi Kinerja dengan realisasi Tahun tahun sebelumnya setidaknya 2 (dua) Tahun terakhir	Akan di lakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan yang memuat realisasi kinerja pada Tahun tahun sebelum nya sebagai pembanding untuk perbaikan Kinerja	Penajaman evaluasi realisasi pada Dokumen SAKIP	1 Minggu (Juni)	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
	2. Agar menginfokan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja baik sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Anggaran secara lengkap pada setiap analisis capaian program	- Laporan Kinerja disusun memuat informasi Capaian dan Hambatan serta solusi sebagai bahan evaluasi dan monitoring	- Laporan Pengukuran Kinerja Triwulanan LPPD, Lapkin Laporan SPM	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		- Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP) dapat digunakan sebagai penilaian dan perbaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian target tahun berikutnya			
	3. Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan Kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas	Menyusun dan menyajikan Laporan Pengukuran kinerja secara berkala baik bulanan/ triwulan/ maupun semesteran	Penajaman Laporan Capaian Kinerja pertriwulan dan Lapkin Tahunan	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala pada level dibawahnya dibuktikan dengan terjadinya perbaikan dan Peningkatan Kinerja	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan di evaluasi secara berkala	4 kali (pertriwulan)  Sedang berproses	Maret, Juni September dan Desember	Sekretaris

*Pelaihari, 31 Desember 2023*  
**Kepala Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Tanah Laut**



**dr. Isna Farida, M. Kes**  
**NIP. 19740612 200501 2 016**





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp.(0512) 21098

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M. Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Pertama,

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10
		2. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran hidup	9,2
		3. Prevalensi Stunting	20%
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Indeks Keluarga Sehat	0,8
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KABUPATEN KOTA		<b>120,909,162,187</b>	
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,938,387
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118,357,528,563
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,999,150
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291,544,219
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,994,000
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,038,400,868
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,757,000

<b>II</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>105,603,312,475</b>
		VIII	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44,677,535,363
		IX	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60,765,371,600
		X	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	8,742,440
		XI	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151,663,072
<b>III</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>13,099,835,213</b>
		XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	13,099,835,213
<b>IV</b>	<b>SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>53,780,800</b>
		XIII	Pemberian Izin Apotik, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,380,000
		XIV	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga	18,200,000
		XV	Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,100,000

		XVI	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	5,100,800
<b>V</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>65,849,240</b>
		XVII	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,850,000
		XVIII	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,999,240
<b>JUMLAH</b>				<b>239,731,939,915</b>

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA

Pelaihari, Januari 2023  
Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

# DINAS KESEHATAN

Jl. H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp.(0512) 21098

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Hj. ISNA FARIDA, M. Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj.Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pj. Bupati Tanah Laut**

**SYAMSIR RAHMAN**

**Pelaihari, 13 Oktober 2023**

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut**

**dr. Hj. ISNA FARIDA, M.Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10
		2.	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran hidup	9,2
		3	Prevalensi Stunting	20%
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Indeks Keluarga Sehat	0,8
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31
NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KABUPATEN KOTA</b>			<b>124,572,387,092</b>
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,938,387
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121,382,528,563
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,999,150
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674,505,973
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,994,000
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,190,656,019
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,765,000

<b>II</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>111,796,599,237</b>
		VIII	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,871,515,582
		IX	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,491,388,983
		X	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	8,742,440
		XI	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,952,232
<b>III</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>12,946,148,033</b>
		XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,935,350,062
		XIII	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,010,797,971
<b>IV</b>	<b>SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>361,893,945</b>
		XIV	Pemberian Izin Apotik, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84,109,434
		XV	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga	116,913,300

		XVI	Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,100,000
		XVII	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	150,771,211
<b>V</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>284,556,805</b>
		XVIII	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,222,565
		IX	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,999,240
		XX	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	147,335,000
<b>JUMLAH</b>				<b>249,961,585,112</b>

Pj. Bupati Tanah Laut



**SYAMSIR RAHMAN**

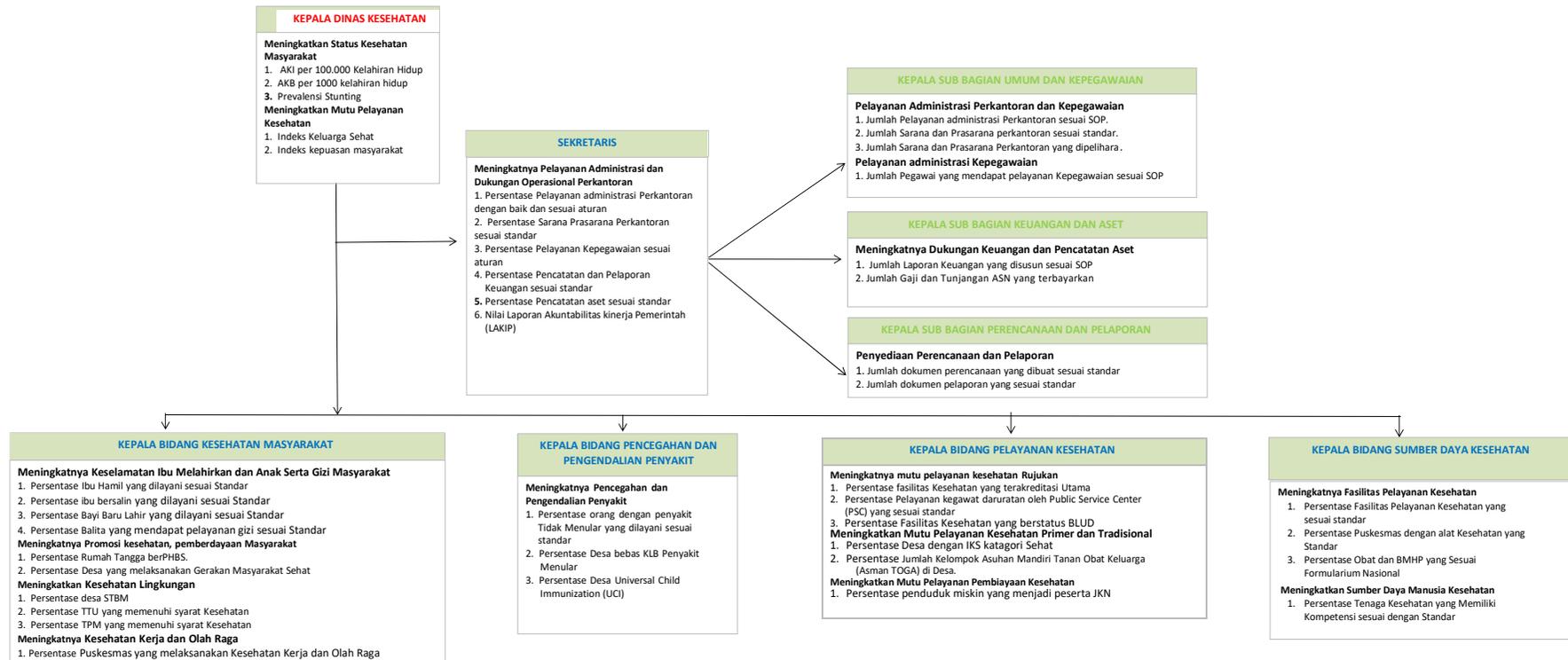
Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**dr. Hj. ISNA FARIDA, M.Kes**  
**NIP. 19740612200501 2 016**

# POHON KINERJA



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M. Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016





No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
							FISIK/ KINERJA	% 7=(6/4)	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	% 10= (8/5)		
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	Puskesmas	Rp 352.735.032							
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dok	Rp 72.217.200							
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>					Rp 64.669.675.144							
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6821	orang	Rp 114.025.000							
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6511	orang	Rp 2.772.302.950							
3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201	orang	Rp 47.970.000							
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25168	orang	Rp 86.439.984							
5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47227	Anak	Rp 55.760.000							
6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677	Orang	Rp 29.805.506			Rp 8.725.962	Rp 21.079.544	29%		
7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp 29.997.570							
8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp 58.414.810			Rp 42.244.108	Rp 16.170.702	72%		
9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp 393.651.935			Rp 18.960.200	Rp 374.691.735	5%		
10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp 20.633.939			Rp 6.252.400	Rp 14.381.539	30%		
11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp 552.261.923			Rp 3.916.000	Rp 548.345.923	1%		
12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp 21.984.670							
13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp 91.215.280							
14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22	dok	Rp 49.551.240							
15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp 2.895.502.096			Rp 3.825.000	Rp 2.891.677.096	0,13%		
16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp 62.335.500							
17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp 132.096.000							
18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp 168.105.280							
19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	22	dok	Rp 71.943.192							
20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp 280.255.571	1	dok	33,33%	Rp 39.305.000	Rp 240.950.571	14,02%	
21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp 4.730.000							
22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang dapatkan Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp 65.064.701			Rp 4.908.800	Rp 60.155.901	7,54%		
23		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dok	Rp 313.701.770							
24		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp 54.133.449.760							
25		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp 150.000.000							
26		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp 1.200.252.267							
27		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp 518.042.000							
28		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp 59.901.100							
29		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	Rp 30.901.100							
30		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 259.380.000							

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KET
					FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11
	31 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400 orang	Rp 135.889.275						
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>			Rp 13.394.875.213			Rp 2.221.584.000			
	<b>I Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan</b>			Rp 13.394.875.213			Rp 2.221.584.000			
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	1500 orang	Rp 13.099.835.213	3	25,00%	Rp 2.221.584.000	10.878.251.213	17%	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 dokumen	Rp 295.040.000						
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN</b>			Rp 239.695.800			#REF!			
	<b>I Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan</b>			Rp 38.580.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44 Sarana	Rp 20.380.000		0,00%				
	<b>II Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah</b>			Rp 18.200.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1 dok	Rp 18.200.000		0,00%				
	<b>III Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan</b>			Rp 20.380.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44 sarana	Rp 20.380.000		0,00%				
	<b>IV Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat</b>			Rp 10.100.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 dok	Rp 10.100.000		0,00%				
	<b>V Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post</b>			Rp 5.100.800						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	11 Unit	Rp 5.100.800		0,00%				
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PASTA OBAT BERBANG KESEHATAN</b>			Rp 65.849.240			Rp -			
	<b>I Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran</b>			Rp 20.850.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dok	Rp 20.850.000						
	<b>II Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif</b>			Rp 44.999.240						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2 dok	Rp 44.999.240						
	<b>III Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan</b>			Rp 147.335.000						
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dok	Rp 147.335.000		0,00%				
						0,00%			#REF!	
						Sangat Rendah			#REF!	

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN 2023**

Bulan : Jun-23

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)		8	9	10= (8/5)	11
<b>DINKES</b>					Rp 241.461.814.112			45%	Rp 93.331.879.758	Rp 148.129.934.354	39%	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				Rp 120.909.162.187			61%	Rp 59.805.631.970	Rp 61.103.530.217	49%	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Rp 69.938.387			71%	Rp 23.318.750	Rp 46.619.637	33%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 69.938.387	5	dok	71%	Rp 23.318.750	Rp 46.619.637	33%	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Rp 118.357.528.563			100%	Rp 58.789.597.865	Rp 59.567.930.698		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	Orang	Rp 118.287.528.834	1100	orang	100%	Rp 58.776.045.365	Rp 59.511.483.469	50%	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	Rp 69.999.729	1	dok	100%	Rp 13.552.500	Rp 56.447.229	19%	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				Rp 13.999.150			61%	Rp 8.515.000	Rp 5.484.150		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	Orang	Rp 13.999.150	168	orang	61%	Rp 8.515.000	Rp 5.484.150	61%	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 291.544.219			49%	Rp 157.351.396	Rp 134.192.823		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp 44.898.051	10	lap	83%	Rp 30.434.500	Rp 14.463.551	68%	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	Rp 24.995.236	11	paket	79%	Rp 9.089.992	Rp 15.905.244	36%	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	Rp 56.049.094	1	paket	33%	Rp 42.943.680	Rp 13.105.414	77%	



No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11				
	4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28	Buah/Unit	Rp	2.309.997.380	3	buah	11%	Rp	94.796.216	Rp	2.215.201.164	4,10%	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	450	Unit	Rp	31.903.188.627	158	unit	35%	Rp	7.500.000	Rp	31.895.688.627	0,02%	
	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	Paket	Rp	699.194.498	1	paket	100%	Rp	15.541.250	Rp	683.653.248	2%	
	7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	3	Paket	Rp	1.344.465.171	1	paket	33%	Rp	59.398.500	Rp	1.285.066.671	4%	
	<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				Rp	8.742.440				Rp	-	Rp	8.742.440		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	dok	Rp	8.742.440									
	<b>III</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				Rp	424.952.232			51%	Rp	14.452.500	Rp	410.499.732		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	Puskesmas	Rp	352.735.032	1	puskesmas	2%	Rp	8.430.000	Rp	344.305.032	2%	
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dok	Rp	72.217.200	1	dok	100%	Rp	6.022.500	Rp	66.194.700	8%	
	<b>IV</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				Rp	64.805.564.419			37%	Rp	29.010.586.602	Rp	35.794.977.817		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6821	orang	Rp	114.025.000	1498	orang	22%						
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6511	orang	Rp	2.772.302.950	1370	orang	21%						
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201	orang	Rp	47.970.000	1307	orang	21%						
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25168	orang	Rp	86.439.984	6429	orang	26%						
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	47227	Anak	Rp	55.760.000	6776	anak	14%	Rp	8.000.000	Rp	47.760.000	14%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677	Orang	Rp 29.805.506	141758	orang	63%	Rp 18.805.506	Rp 11.000.000	63%	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp 29.997.570	10295	orang	44%	Rp 10.000.000	Rp 19.997.570	33%	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp 58.414.810	21365	orang	82%	Rp 47.614.108	Rp 10.800.702	82%	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendaptkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp 393.651.935	265	orang	5%	Rp 18.960.200	Rp 374.691.735	5%	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp 20.633.939	279	orang	56%	Rp 11.517.400	Rp 9.116.539	56%	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp 552.261.923	261	orang	5%	Rp 25.331.000	Rp 526.930.923	5%	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp 21.984.670	3259	orang	44%				
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp 91.215.280							
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22	dok	Rp 49.551.240							
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp 2.895.502.096	1	dok	4%	Rp 15.445.000	Rp 2.880.057.096	1%	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp 62.335.500	1	dok	33%	Rp 22.872.880	Rp 39.462.620	37%	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp 132.096.000							
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp 168.105.280	1	dok	33%	Rp 42.000.000	Rp 126.105.280	25%	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	22	dok	Rp 71.943.192	2	dok	10%	Rp 7.105.000	Rp 64.838.192	10%	
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp 280.255.571	1	dok	33%	Rp 83.085.000	Rp 197.170.571	30%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET			
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%					
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11			
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp	4.730.000								
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkkan Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp	65.064.701	3226	orang	70%	Rp	45.258.800	Rp	19.805.901	70%
	23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dok	Rp	313.701.770	1	dok	8%	Rp	24.441.000	Rp	289.260.770	8%
	24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp	54.133.449.760	5	dok	26%	Rp	27.922.836.208	Rp	26.210.613.552	52%
	25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp	150.000.000								
	26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp	1.200.252.267	3	dok	100%	Rp	659.692.000	Rp	540.560.267	55%
	27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp	518.042.000	6	dok	14%	Rp	16.275.000	Rp	501.767.000	3%
	28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp	59.901.100	1	lap	100%	Rp	3.777.500	Rp	56.123.600	6%
	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	Rp	30.901.100	1	dok	100%	Rp	10.095.000	Rp	20.806.100	33%
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp	259.380.000	1	unit	100%	Rp	17.475.000	Rp	241.905.000	7%
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400	orang	Rp	135.889.275	28	orang	2%					
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					Rp	14.135.973.184			41%	Rp	4.287.402.720	Rp	9.848.570.464	30%
<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					Rp	13.394.875.213			40%	Rp	4.262.282.720	Rp	9.132.592.493	
	<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Memenuh Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	1500	orang	Rp	13.099.835.213	5	orang	42%	Rp	4.150.282.720		8.949.552.493	32%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET			
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN		%		
1	2		3		4		5			6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		3	dokumen	Rp	295.040.000	1	dok	38%	Rp	112.000.000	183.040.000	38%	
	II	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					Rp	741.097.971			42%	Rp	25.120.000	Rp	715.977.971	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		334	orang	Rp	741.097.971	11	orang	42%	Rp	25.120.000	715.977.971	3%	
	IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					Rp	53.780.800			44%	Rp	16.050.000	Rp	37.730.800	30%
	I	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>					Rp	18.200.000			100%	Rp	5.500.000	Rp	12.700.000	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga		1	dok	Rp	18.200.000	1	dok	100%	Rp	5.500.000	Rp	12.700.000	30%
	II	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>					Rp	20.380.000			50%	Rp	10.100.000	Rp	10.280.000	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		44	sarana	Rp	20.380.000	22	sarana	50%	Rp	10.100.000	Rp	10.280.000	50%
	III	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>					Rp	10.100.000			0%	Rp	-	Rp	10.100.000	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)		2	dok	Rp	10.100.000			0%					
	IV	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>					Rp	5.100.800			27%	Rp	450.000	Rp	4.650.800	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		11	Unit	Rp	5.100.800	3	unit	27%	Rp	450.000	Rp	4.650.800	9%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				Rp 213.184.240			33%	Rp 20.520.000	Rp 192.664.240	10%	
<b>I</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				Rp 20.850.000			50%	Rp 12.425.000	Rp 8.425.000		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dok	Rp 20.850.000	1	dok	50%	Rp 12.425.000	Rp 8.425.000	60%	
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				Rp 44.999.240			50%	Rp 8.095.000	Rp 36.904.240		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2	dok	Rp 44.999.240	1	dok	50%	Rp 8.095.000	Rp 36.904.240	18%	
<b>III</b>	<b>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</b>				Rp 147.335.000				Rp -	Rp 147.335.000		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	dok	Rp 147.335.000			0%				

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (MURNI)**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER TAHUN 2023**

Bulan : Sep-23

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11		
<b>DINKES</b>					Rp 241.461.814.112		63%	Rp 142.249.994.045	Rp 99.211.820.067	59%		
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				Rp 120.909.162.187		93%	Rp 83.932.228.806	Rp 36.976.933.381	69%		
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Rp 69.938.387		71%	Rp 24.818.750	Rp 45.119.637	35%		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 69.938.387	5	dok	71%	Rp 24.818.750	Rp 45.119.637	35%	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Rp 118.357.528.563		100%	Rp 82.373.217.382	Rp 35.984.311.181			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	Orang	Rp 118.287.528.834	1100	orang	100%	Rp 82.345.042.382	Rp 35.942.486.452	70%	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	Rp 69.999.729	1	dok	100%	Rp 28.175.000	Rp 41.824.729	40%	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				Rp 13.999.150		99%	Rp 13.435.000	Rp 564.150			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	Orang	Rp 13.999.150	275	orang	99%	Rp 13.435.000	Rp 564.150	96%	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 291.544.219		90%	Rp 260.142.833	Rp 31.401.386			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp 44.898.051	12	lap	100%	Rp 30.434.500	Rp 14.463.551	68%	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	Rp 24.995.236	14	paket	100%	Rp 19.856.690	Rp 5.138.546	79%	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	Rp 56.049.094	3	paket	100%	Rp 53.097.440	Rp 2.951.654	95%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET		
									FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%				
1	2		3		4		5		6	7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11		
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang Disediakan		12	dok	Rp	2.664.000	9	dok	75%	Rp	1.800.000	Rp	864.000	68%	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	lap	Rp	162.937.838	9	lap	75%	Rp	154.954.203	Rp	7.983.635	95%	
	<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>5.994.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>4.872.000</b>	<b>Rp</b>	<b>1.122.000</b>		
		<b>Sub Kegiatan :</b>															
	18.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	unit	Rp	5.994.000	2	unit	100%	Rp	4.872.000	Rp	1.122.000	81%	
	<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>2.038.400.868</b>			<b>91%</b>	<b>Rp</b>	<b>1.127.718.341</b>	<b>Rp</b>	<b>910.682.527</b>	<b>55%</b>	
		<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	lap	Rp	401.444.415	3	lap	100%	Rp	140.676.021	Rp	260.768.394	35%	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		11	lap	Rp	1.636.956.453	9	lap	82%	Rp	987.042.320	Rp	649.914.133	60%	
	<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>131.757.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>128.024.500</b>	<b>Rp</b>	<b>3.732.500</b>	<b>97%</b>	
		<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	unit	Rp	111.000.000,00	20	unit	100%	Rp	110.815.500	Rp	184.500	100%	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	jenis	Rp	20.757.000	3	jenis	100%	Rp	17.209.000	Rp	3.548.000	83%	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>Rp</b>	<b>106.149.713.701</b>			<b>75%</b>	<b>Rp</b>	<b>52.007.663.939</b>	<b>Rp</b>	<b>54.142.049.762</b>	<b>49%</b>	
	<b>I</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp</b>	<b>40.910.454.610</b>			<b>99%</b>	<b>Rp</b>	<b>7.864.922.694</b>	<b>Rp</b>	<b>33.045.531.916</b>		
		<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		3	Unit	Rp	307.307.068	1	Unit	33%	Rp	11.704.950	Rp	295.602.118	3,81%	
	2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1	Unit	Rp	3.914.537.951	0.22	Unit	0%	Rp	1.076.638.315	Rp	2.837.899.636	27,50%	
	3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		2	Unit	Rp	431.763.915	0	Unit	0%	Rp	-	Rp	431.763.915	0,00%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	7=(6/4)	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		10= (8/5)			
1	2	3	4		5	6			8	9	10= (8/5)	11				
	4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28	Buah/Unit	Rp	2.309.997.380	17	buah	61%	Rp	527.729.195	Rp	1.782.268.185	22,85%	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	450	Unit	Rp	31.903.188.627	450	unit	100%	Rp	4.964.409.091	Rp	26.938.779.536	15,56%	
	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	Paket	Rp	699.194.498	1	paket	100%	Rp	375.982.408	Rp	323.212.090	54%	
	7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	3	Paket	Rp	1.344.465.171	3	paket	100%	Rp	908.458.735	Rp	436.006.436	68%	
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>					<b>Rp</b>	<b>8.742.440</b>				<b>Rp</b>	<b>2.470.000</b>	<b>Rp</b>	<b>6.272.440</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	dok	Rp	8.742.440	0	dok	0%	Rp	2.470.000	Rp	6.272.440	28%	
<b>III</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp</b>	<b>424.952.232</b>			<b>59%</b>	<b>Rp</b>	<b>65.172.500</b>	<b>Rp</b>	<b>359.779.732</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	Puskesmas	Rp	352.735.032	4	puskesmas	18%	Rp	58.745.000	Rp	293.990.032	17%	
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dok	Rp	72.217.200	1	dok	100%	Rp	6.427.500	Rp	65.789.700	9%	
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp</b>	<b>64.805.564.419</b>			<b>66%</b>	<b>Rp</b>	<b>44.075.098.745</b>	<b>Rp</b>	<b>20.730.465.674</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6821	orang	Rp	114.025.000	3599	orang	53%	Rp	94.180.000	Rp	19.845.000	83%	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6511	orang	Rp	2.772.302.950	3810	orang	59%	Rp	22.402.750	Rp	2.749.900.200	1%	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201	orang	Rp	47.970.000	3694	orang	60%	Rp	47.970.000	Rp	-	100%	
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25168	orang	Rp	86.439.984	17532	orang	70%	Rp	8.741.250	Rp	77.698.734	10%	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	47227	Anak	Rp	55.760.000	6776	anak	14%	Rp	13.610.000	Rp	42.150.000	24%	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677	Orang	Rp	29.805.506	72845	orang	32%	Rp	18.805.506	Rp	11.000.000	63%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6			7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11		
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp	29.997.570	15430	orang	66%	Rp	10.000.000	Rp	19.997.570	33%	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp	58.414.810	11673	orang	45%	Rp	48.664.108	Rp	9.750.702	83%	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp	393.651.935	3644	orang	66%	Rp	287.029.000	Rp	106.622.935	73%	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp	20.633.939	342	orang	68%	Rp	16.017.400	Rp	4.616.539	78%	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp	552.261.923	1188	orang	21%	Rp	49.527.250	Rp	502.734.673	9%	
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp	21.984.670	4787	orang	65%	Rp	-	Rp	21.984.670	0%	
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp	91.215.280	1	dok	100,00%	Rp	960.000	Rp	90.255.280	1%	
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22	dok	Rp	49.551.240	4	dok	18,18%	Rp	780.000	Rp	48.771.240	2%	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp	2.895.502.096	26	dok	100%	Rp	116.150.000	Rp	2.779.352.096	4%	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp	62.335.500	1	dok	33%	Rp	30.612.880	Rp	31.722.620	49%	
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp	132.096.000	1	dok	100%	Rp	50.195.219	Rp	81.900.781	38%	
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp	168.105.280	1	dok	33%	Rp	90.926.080	Rp	77.179.200	54%	
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	22	dok	Rp	71.943.192	4	dok	18%	Rp	12.165.000	Rp	59.778.192	17%	
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp	280.255.571	1	dok	33%	Rp	139.001.200	Rp	141.254.371	50%	
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp	4.730.000	342	orang	68%	Rp	4.730.000	Rp	-	100%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	7=(6/4)	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		10= (8/5)			
1	2	3	4		5	6			Rp	8	9	10= (8/5)	11			
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp	65.064.701	2429	orang	52,4%	Rp	57.064.889	Rp	7.999.812	88%	
	23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	dok	Rp	313.701.770	1	dok	100%	Rp	227.141.000	Rp	86.560.770	72%	
	24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp	54.133.449.760	14	dok	74%	Rp	41.661.104.968	Rp	12.472.344.792	77%	
	25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp	150.000.000	0	dok	0%	Rp	3.800.000	Rp	146.200.000	3%	
	26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp	1.200.252.267	3	dok	100%	Rp	754.672.000	Rp	445.580.267	63%	
	27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp	518.042.000	28	dok	64%	Rp	115.275.000	Rp	402.767.000	22%	
	28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp	59.901.100	1	lap	100%	Rp	12.777.500	Rp	47.123.600	21%	
	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	Rp	30.901.100	1	dok	100%	Rp	20.368.050	Rp	10.533.050	66%	
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp	259.380.000	1	unit	100%	Rp	45.300.000	Rp	214.080.000	17%	
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400	orang	Rp	135.889.275	554	orang	40%	Rp	115.127.695	Rp	20.761.580	85%	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					<b>Rp</b>	<b>14.135.973.184</b>			<b>51%</b>	<b>Rp</b>	<b>6.225.344.250</b>	<b>Rp</b>	<b>7.910.628.934</b>	<b>44%</b>	
	<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp</b>	<b>13.394.875.213</b>			<b>51%</b>	<b>Rp</b>	<b>6.200.224.250</b>	<b>Rp</b>	<b>7.194.650.963</b>		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	1500	orang	Rp	13.099.835.213	1040	orang	69%	Rp	6.088.224.250	Rp	7.011.610.963	46%	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	dokumen	Rp	295.040.000	1	dok	33%	Rp	112.000.000	Rp	183.040.000	38%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN		%
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11
	<b>II</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Rp 741.097.971</b>			<b>50%</b>	<b>Rp 25.120.000</b>	<b>Rp 715.977.971</b>			
		<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	334	orang	Rp 741.097.971	168	orang	50%	Rp 25.120.000	Rp 715.977.971	3%	
	<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>Rp 53.780.800</b>			<b>44%</b>	<b>Rp 38.597.050</b>	<b>Rp 15.183.750</b>	<b>72%</b>		
	<b>I</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>			<b>Rp 18.200.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 11.000.000</b>	<b>Rp 7.200.000</b>			
		<b>Sub Kegiatan :</b>											
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1	dok	Rp 18.200.000	1	dok	100%	Rp 11.000.000	Rp 7.200.000	60%	
	<b>II</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>			<b>Rp 20.380.000</b>			<b>50%</b>	<b>Rp 12.396.250</b>	<b>Rp 7.983.750</b>			
		<b>Sub Kegiatan :</b>											
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	sarana	Rp 20.380.000	22	sarana	50%	Rp 12.396.250	Rp 7.983.750	61%	
	<b>III</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>			<b>Rp 10.100.000</b>			<b>0%</b>	<b>Rp 10.100.000</b>	<b>Rp -</b>			
		<b>Sub Kegiatan :</b>											
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dok	Rp 10.100.000	0	dok	0%	Rp 10.100.000	Rp -	100%	
	<b>IV</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>			<b>Rp 5.100.800</b>			<b>27%</b>	<b>Rp 5.100.800</b>	<b>Rp -</b>			
		<b>Sub Kegiatan :</b>											
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	11	Unit	Rp 5.100.800	3	unit	27%	Rp 5.100.800	Rp -	100%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%			
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				<b>Rp 213.184.240</b>			<b>50%</b>	<b>Rp 46.160.000</b>	<b>Rp 167.024.240</b>	<b>22%</b>		
<b>I</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 20.850.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 16.205.000</b>	<b>Rp 4.645.000</b>			
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dok	Rp 20.850.000	2	dok	100%	Rp 16.205.000	Rp 4.645.000	78%		
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 44.999.240</b>			<b>50%</b>	<b>Rp 20.630.000</b>	<b>Rp 24.369.240</b>			
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2	dok	Rp 44.999.240	1	dok	50%	Rp 20.630.000	Rp 24.369.240	46%		
<b>III</b>	<b>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</b>				<b>Rp 147.335.000</b>				<b>Rp 9.325.000</b>	<b>Rp 138.010.000</b>			
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	dok	Rp 147.335.000	1	dok	25%	Rp 9.325.000	Rp 138.010.000	6%		

**CAPAIAN KINERJA +B1:P103DAN KEUANGAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2023**

Bulan : DESEMBER 2023

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
					FISIK/ KINERJA	%		KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11
<b>DINKES</b>				<b>Rp 249.961.585.112</b>			<b>95%</b>	<b>Rp 218.153.016.384</b>	<b>Rp 31.808.568.728</b>	<b>87%</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>			<b>Rp 124.572.387.092</b>			<b>98%</b>	<b>Rp 107.537.386.428</b>	<b>Rp 17.035.000.664</b>	<b>86%</b>	
	<b>I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 69.938.387</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 34.101.230</b>	<b>Rp 35.837.157</b>	<b>49%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	<b>Rp 69.938.387</b>	7 dok		<b>100%</b>	Rp 34.101.230	Rp 35.837.157	<b>49%</b>	
	<b>II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 121.382.528.563</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 105.096.423.209</b>	<b>Rp 16.286.105.354</b>	<b>87%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang	Rp 121.312.528.834	1100 orang		100%	Rp 105.040.448.709	Rp 16.272.080.125	87%	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	Rp 69.999.729	1 dok		100%	Rp 55.974.500	Rp 14.025.229	80%	
	<b>III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 13.999.150</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 13.960.000</b>	<b>Rp 39.150</b>	<b>100%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277 Orang	Rp 13.999.150	277 orang		100%	Rp 13.960.000	Rp 39.150	100%	
	<b>IV Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 674.505.973</b>			<b>83%</b>	<b>Rp 628.016.860</b>	<b>Rp 46.489.113</b>	<b>93%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	Rp 64.864.624	12 lap		100%	Rp 47.873.500	Rp 16.991.124	74%	
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	Rp 42.990.723	14 paket		100%	Rp 35.626.071	Rp 7.364.652	83%	
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	Rp 81.048.788	4 paket		100%	Rp 73.511.616	Rp 7.537.172	91%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11				
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	dok	Rp	2.664.000	12	dok	100%	Rp	2.400.000	Rp	264.000	90%	
	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	Paket	Rp	20.000.000	2	paket	100%	Rp	19.998.000	Rp	2.000	100%	
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	462.937.838	12	lap	100%	Rp	448.607.673	Rp	14.330.165	97%	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>5.994.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>4.872.000</b>	<b>Rp</b>	<b>1.122.000</b>	<b>81%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	18.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	Rp	5.994.000	2	unit	100%	Rp	4.872.000	Rp	1.122.000	81%	
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>2.190.656.019</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>1.528.174.179</b>	<b>Rp</b>	<b>662.481.840</b>	<b>70%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	lap	Rp	401.444.415	3	lap	100%	Rp	212.739.959	Rp	188.704.456	53%	Persiapan listrik RS Bumak tdk terealisasi
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	lap	Rp	1.789.211.604	12	lap	100%	Rp	1.315.434.220	Rp	473.777.384	74%	
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Rp</b>	<b>234.765.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>231.838.950</b>	<b>Rp</b>	<b>2.926.050</b>	<b>99%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	Rp	210.900.000	20	unit	100%	Rp	210.844.950	Rp	55.050	100%	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	jenis	Rp	23.865.000	3	jenis	100%	Rp	20.994.000	Rp	2.871.000	88%	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					<b>Rp</b>	<b>111.796.599.237</b>			<b>96%</b>	<b>Rp</b>	<b>100.984.232.706</b>	<b>Rp</b>	<b>10.812.366.531</b>	<b>90%</b>	
<b>I</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp</b>	<b>46.871.515.582</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>38.708.464.520</b>	<b>Rp</b>	<b>8.163.051.062</b>	<b>83%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3	Unit	Rp	436.438.882	3	Unit	100%	Rp	389.811.680	Rp	46.627.202	89,32%	
	2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	Rp	3.914.537.951	1	Unit	100%	Rp	3.469.664.959	Rp	444.872.992	88,64%	
	3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2	Unit	Rp	431.763.915	2	Unit	100%	Rp	422.000.000	Rp	9.763.915	97,74%	
	4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28	Buah/Unit	Rp	4.945.680.102	27	buah	96%	Rp	3.372.740.351	Rp	1.572.939.751	68,20%	1 unit ambulance RS Bumak tidak terealisasi krn spek kosong
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	450	Unit	Rp	32.703.517.265	450	unit	100%	Rp	27.030.467.044	Rp	5.673.050.221	82,65%	
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	150	Unit	Rp	395.740.000	150	Unit	100%	Rp	197.576.250	Rp	198.163.750	49,93%	
	7	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	Paket	Rp	1.699.140.196	1	paket	100%	Rp	1.656.258.550	Rp	42.881.646	97%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%			
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11
	8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan		Rp 2.344.697.271	3	paket	100%	Rp	2.169.945.686	Rp 174.751.585	93%	
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				<b>Rp 8.742.440</b>			100,00%	<b>Rp</b>	<b>5.875.000</b>	<b>Rp 2.867.440</b>	<b>67%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Rp 8.742.440	22	dok	100%	Rp	5.875.000	Rp 2.867.440	67%	
<b>III</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 424.952.232</b>			<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>195.663.750</b>	<b>Rp 229.288.482</b>	<b>46%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		Rp 352.735.032	22	Puskesmas	100%	Rp	169.395.000	Rp 183.340.032	48%	kesalahan pada saat entry RKA
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Rp 72.217.200	1	dok	100%	Rp	26.268.750	Rp 45.948.450	36%	
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 64.491.388.983</b>			<b>89%</b>	<b>Rp</b>	<b>62.074.229.436</b>	<b>Rp 2.417.159.547</b>	<b>96%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Rp 344.808.975	4864	orang	71%	Rp	302.750.200	Rp 42.058.775	88%	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Rp 22.418.950	5258	orang	81%	Rp	22.402.750	Rp 16.200	100%	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Rp 47.970.000	5131	orang	83%	Rp	47.970.000	Rp -	100%	
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan		Rp 365.372.850	23898	orang	95%	Rp	326.036.250	Rp 39.336.600	89%	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart		Rp 55.760.000	47227	Anak	100%	Rp	42.310.000	Rp 13.450.000	76%	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Rp 29.805.506	109421	orang	49%	Rp	29.805.506	Rp -	100%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6			7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11			
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp	29.997.570	28159	orang	120%	Rp	29.190.080	Rp	807.490	97%	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp	58.414.810	19369	orang	74%	Rp	54.034.108	Rp	4.380.702	93%	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp	393.873.452	4594	orang	84%	Rp	336.219.661	Rp	57.653.791	85%	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp	20.633.939	426	orang	85%	Rp	20.289.400	Rp	344.539	98%	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp	552.261.923	5410	orang	95%	Rp	49.527.250	Rp	502.734.673	9%	Pengadaan TCM dibekukan
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp	21.984.670	7370	orang	100%	Rp	20.421.000	Rp	1.563.670	93%	
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp	91.215.280	1	dok	100,00%	Rp	55.120.000	Rp	36.095.280	60%	
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22	dok	Rp	49.551.240	5	dok	22,73%	Rp	2.420.000	Rp	47.131.240	5%	Kasus Bencana
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp	2.895.502.096	26	dok	100%	Rp	2.249.642.116	Rp	645.859.980	78%	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp	62.335.500	3	dok	100%	Rp	35.037.880	Rp	27.297.620	56%	Kegiatan bimtek yang melibatkan linsek tidak terlaksana karena ada kegiatan penyerapan DAK BPOM
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp	312.096.000	1	dok	100%	Rp	228.232.534	Rp	83.863.466	73%	
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp	168.105.280	3	dok	100%	Rp	137.586.080	Rp	30.519.200	82%	
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	22	dok	Rp	71.943.192	22	dok	100%	Rp	52.270.000	Rp	19.673.192	73%	
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp	280.255.571	3	dok	100%	Rp	185.828.700	Rp	94.426.871	66%	Tergantung kasus yg terjadi
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp	4.730.000	426	orang	85%	Rp	4.730.000	Rp	-	100%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11			
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp	343.063.599	2429	orang	52,4%	Rp	69.170.908	Rp	273.892.691	20%	proses MOU belum selesai shg keg blm bs dilaksanakan
	23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	dok	Rp	313.701.770	1	dok	100%	Rp	266.346.000	Rp	47.355.770	85%	
	24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp	55.633.441.068	19	dok	100%	Rp	55.568.439.868	Rp	65.001.200	100%	
	25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp	117.780.000	2	dok	100%	Rp	106.843.000	Rp	10.937.000	91%	
	26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp	1.200.252.267	3	dok	100%	Rp	935.484.000	Rp	264.768.267	78%	
	27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp	518.042.000	44	dok	100%	Rp	474.436.400	Rp	43.605.600	92%	
	28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp	59.901.100	1	lap	100%	Rp	25.190.000	Rp	34.711.100	42%	Kasus
	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	Rp	30.901.100	1	dok	100%	Rp	30.463.050	Rp	438.050	99%	
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp	259.380.000	1	unit	100%	Rp	250.905.000	Rp	8.475.000	97%	
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400	orang	Rp	135.889.275	920	orang	66%	Rp	115.127.695	Rp	20.761.580	85%	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					<b>Rp</b>	<b>12.946.148.033</b>			<b>85%</b>	<b>Rp</b>	<b>9.310.885.300</b>	<b>Rp</b>	<b>3.635.262.733</b>	<b>72%</b>	
	<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp</b>	<b>11.935.350.062</b>		<b>84%</b>	<b>Rp</b>	<b>8.527.158.400</b>	<b>Rp</b>	<b>3.408.191.662</b>	<b>71%</b>	
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	1500	orang	Rp	11.640.310.062	1021	orang	68%	Rp	8.244.918.400	Rp	3.395.391.662	71%	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	dokumen	Rp	295.040.000	3	dok	100%	Rp	282.240.000	Rp	12.800.000	96%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11	
II	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				Rp 1.010.797.971			87%	Rp 783.726.900	Rp 227.071.071	78%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	334	orang	Rp 1.010.797.971	290	orang	87%	Rp 783.726.900	Rp 227.071.071	78%	
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				Rp 361.893.945			97%	Rp 108.073.750	Rp 253.820.195	30%	
I	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>				Rp 116.913.300			100%	Rp 54.213.500	Rp 62.699.800	46%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1	dok	Rp 116.913.300	1	dok	100%	Rp 54.213.500	Rp 62.699.800	46%	Pagu APBD sebesar Rp 18.200.000 tidak terserap di Sewa Gedung dan Honor narasumber karena menyesuaikan real, penambahan PAGU
II	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>				Rp 84.109.434			86%	Rp 12.786.250	Rp 71.323.184	15%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	sarana	Rp 84.109.434	38	sarana	86%	Rp 12.786.250	Rp 71.323.184	15%	
III	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>				Rp 10.100.000			100%	Rp 10.100.000	Rp -	100%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dok	Rp 10.100.000	2	dok	100%	Rp 10.100.000	Rp -	100%	
IV	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>				Rp 150.771.211			100%	Rp 30.974.000	Rp 119.797.211	21%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	11	Unit	Rp 150.771.211	11	unit	100%	Rp 30.974.000	Rp 119.797.211	21%	Pagu APBD sebesar Rp 5.100.000 tidak terserap di cetak stiker, penambahan PAGU dari DAK BPOM yang mulai dilaksanakan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%			
1	2	3	4		5	6		7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				<b>Rp 284.556.805</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 212.438.200</b>	<b>Rp 72.118.605</b>	<b>75%</b>		
<b>I</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 92.222.565</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 45.930.440</b>	<b>Rp 46.292.125</b>	<b>50%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dok	Rp 92.222.565	2	dok	100%	Rp 45.930.440	Rp 46.292.125	50%	Kegiatan sudah terlaksana seluruhnya, akan tetapi penyerapan anggaran tidak dilakukan pada transport peserta penyuluhan karena	
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp 44.999.240</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 44.897.760</b>	<b>Rp 101.480</b>	<b>100%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2	dok	Rp 44.999.240	2	dok	100%	Rp 44.897.760	Rp 101.480	100%		
<b>III</b>	<b>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</b>				<b>Rp 147.335.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 121.610.000</b>	<b>Rp 25.725.000</b>	<b>83%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	dok	Rp 147.335.000	4	dok	100%	Rp 121.610.000	Rp 25.725.000	83%		

**TABEL**  
**MONITORING EVALUASI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM CAPAIAN RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2023**

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	
Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Ibu melahirkan dan anak serta gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	100%	77,7%	77,7%	
			Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	100%	86,9%	86,9%	
			Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	100%	89,4%	89,4%	
			Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%	84,6%	84,6%	
	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Rumah Tangga berPHBS	60%	50,8%	84,7%	
			Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat sehat	100%	100%	100%	
			Persentase desa STBM	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan		Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	57,14%	71,42%	
			Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	61,38%	87,68%	
	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	22,72%	22,72%	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	22,72%	22,72%	
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	87,1%	87,1%	
			Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	3 desa	2,22	
			Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	114 desa UCI	84,44	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama (dan Paripurna)	68%	73%	107%	
			Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%	
			Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	50%	0,015%	0,0%	
			Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%	100%	178,6%	
			Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	94,51%	94,5%	
	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	80%	80%	100,0%
				Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	55,42%	55,4%
				Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	100%	90%	90,0%
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100,0%
	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100,0%
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100,0%
				Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100,0%
				Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100,0%
				Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100,0%
				Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	74	81,5	110%

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut**



**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
**NIP. 197406132005012016**

**MATRIK KESELARASAN 2023**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran		
									Terkait	Tidak Terkait	
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat		Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar	Rp	344.808.975	
			Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp	22.418.950	
			Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	Rp	47.970.000	
			Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Rp	365.372.850	
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Rumah Tangga berPHBS		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	92.222.565	

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran	
									Terkait	Tidak Terkait
			Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp	168.105.280
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan		Persentase desa STBM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp	147.335.000
			Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	312.096.000
			Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Rp	116.913.300

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran	
									Terkait	Tidak Terkait
						02. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	84.109.434
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	'Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp	10.100.000
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut	Rp	150.771.211



No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran		
									Terkait	Tidak Terkait	
			Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	280.255.571	
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan		Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	Rp	518.042.000	
			Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Rp	259.380.000	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Rp	352.735.032	
			Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat					Jumlah keluarga yang didata dalam pendataan keluarga sehat			
			Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Rp	71.943.192	



No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran		
									Terkait	Tidak Terkait	
			Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Rp	1.699.140.196	
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	Rp	2.344.697.271	
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rp	1.010.797.971	
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran		Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	81.048.788	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	462.937.838	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp	42.990.723	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	64.864.624	

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Anggaran		
									Terkait	Tidak Terkait	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp	5.994.000	
			Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp	13.999.150	
			Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	105.040.448.709	
			Persentase Pencatatan aset sesuai standar				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	69.999.729	
			Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp	69.938.387	